

BIDIK

NASIONAL

SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01 TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

Gubernur Khofifah Bersaksi di Pengadilan Tipikor

SIDOARJO, BN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menepati janjinya untuk kooperatif memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Gubernur Khofifah di Pengadilan Tipikor. (ist)

BONGKAR DUGAAN KORUPSI HIBAH DPUBM JATIM (3)

□ Dari Proyek Fiktif, LPJ Bermasalah, Hingga Pengurangan Volume

SURABAYA, BN - GELOMBANG tuntutan penuntasan perkara korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur yang kian menguat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut keterlibatan unsur eksekutif sebagai penanggung-jawab anggaran, bukan tanpa alasan.

LEMAHNYA sistem penyelenggaraan dana hibah dan abstainnya regulasi yang mengatur tentang tanggungjawab pengawasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan dana hibah, disebut-sebut menjadi peluang terjadinya korupsi dana

terkesan menjadi kewajiran. Ironisnya, Pemerintah Daerah berpangku tangan.

Pelanggaran kepatuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada penyelenggaraan belanja hibah tersebut diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 60.B/

LHP/XVIII.SBY/05/2023 BAB I B Nomor 7.

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 5 kelemahan perencanaan belanja hibah, 9 kelemahan pengendalian pelaksanaan hingga kelemahan sistem monitoring dan evaluasi belanja hibah pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Provinsi Jawa Timur.

Dalam dokumen sepanjang lima halaman ■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Cita Rosita Sigit Prakoeswa
Direktur RSUD Dr. SoetomoKhofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa TimurEdy Tambeng Widjaja
Kepala Dinas PUBM Jatim

Gaji Terpidana, Berujung Temuan BPK

□ Rugikan Keuangan Rp 61 Juta, Dinas Pendidikan: Kami Angsur



PASURUAN, BN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyatakan, Realisasi Belanja Gaji ASN pada Dinas Pendidikan Kab Pasuruan sebesar Rp 1.327.586.999.498,00 tidak sesuai ketentuan.

Pelanggaran ketentuan peraturan tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 75.B/LHP/XVIII.SBY/05/2025 BAB 1 Huruf B BELANJA DAERAH. Dengan pokok-pokok temuan pemeriksaan pelanggaran sebagai berikut:

Berdasarkan pemeriksaan atas daftar pembayaran gaji ASN dan dokumen pendukung kepegawaian lain yang diperoleh dari Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur ■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Proyek RSUD Dr. Soetomo Rp 1,8 M Rugikan APBD Jatim

SURABAYA, BN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengungkap potensi kerugian keuangan daerah atas perhitungan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi pada RSUD dr. Soetomo Jawa Timur.

Pelanggaran sistemik tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 85/LHP/XVIII.SBY/12/2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Jawa Timur di temukan permasalahan dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1.Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis atas Paket ■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Puluhan Miliar Belanja Kab. Kediri Tidak Tepat

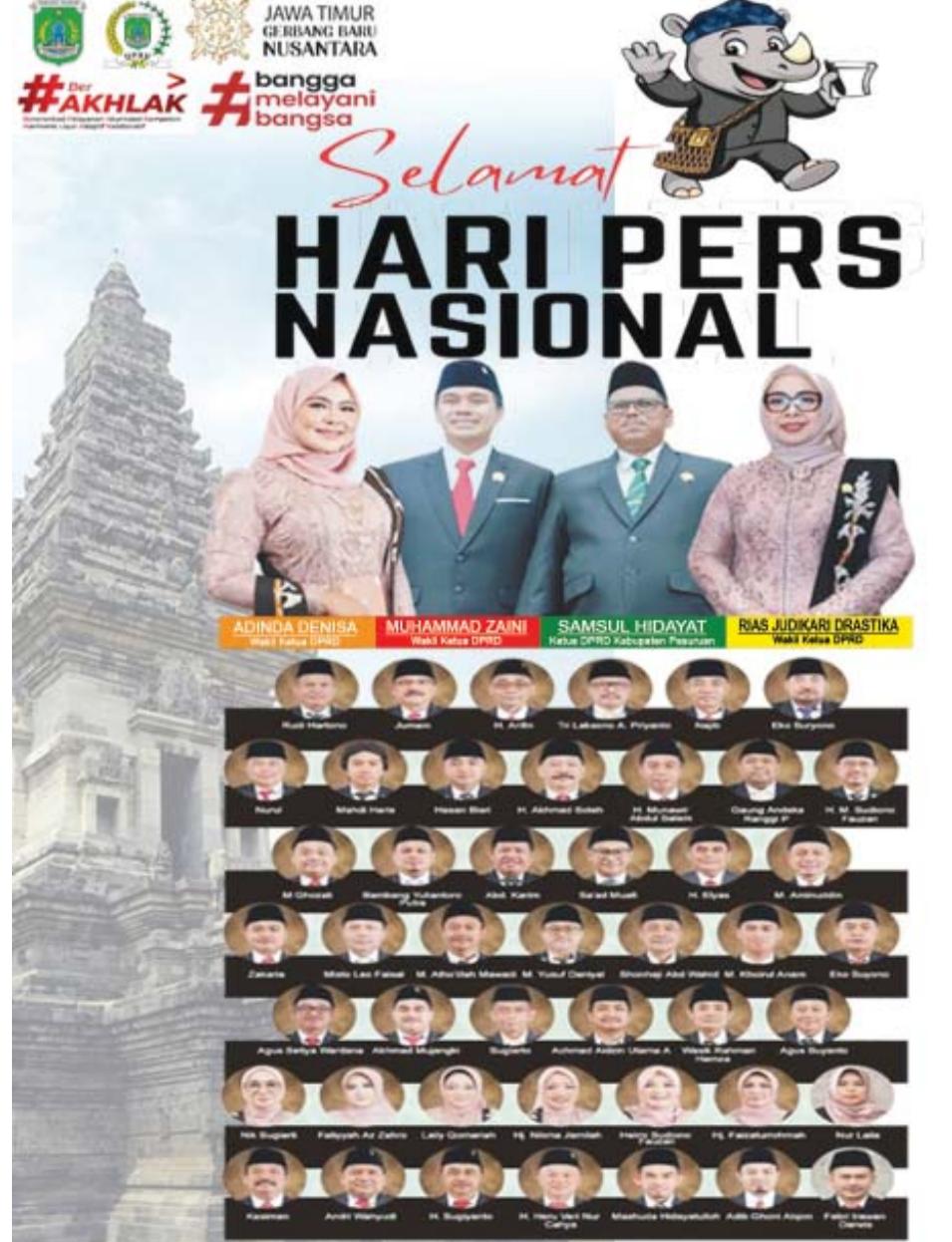
□ Kesalahan Penganggaran Rp 64,863 M

KEDIRI, BN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menemukan Kesalahan Penganggaran atas Belanja Daerah sebesar Rp.64.863.186.351,02 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023. Temuan tersebut tersaji dalam ResUME Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan nomor 63.B/LHP/XIII.SBY/04/2024 Dengan pokok-pokok temuan sebagaimana telah kami rangkum berikut:

a.Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp110.555.840,00

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen penganggaran dan realisasi Belanja pada enam OPD menunjukkan terdapat kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2023 yang seharusnya dianggarkan sebagai Belanja Modal. Belanja Barang dan Jasa tersebut digunakan untuk kegiatan pemeliharaan Gedung, perbaikan Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp110.555.840,00.

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Keluarga Besar SMA Negeri 1 Kabupaten Magetan Mengucapkan

HARI PERS NASIONAL 2026

Hari Pers Nasional Banten 2026

Kepala SMA Negeri 1 Kabupaten Magetan ARIS SUDARMONO



Gubernur Jawa Timur Apresiasi Sistem Pembelajaran di SMKN 1 Buduran Sidoarjo

SIDOARJO, BN — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi sistem pembelajaran di SMK Negeri 1 Buduran, Sidoarjo, yang dinilai berhasil mencetak lulusan siap kerja dan berdaya saing tinggi. Model pendidikan berbasis praktik dimilai menjadi kunci kuatnya serapan lulusan di dunia kerja.

Menurut Khofifah, banyak siswa SMKN 1 Buduran bahkan sudah dipesan perusahaan sebelum mereka lulus sekolah. Hal itu menunjukkan tingkat kepercayaan dunia usaha dan dunia industri terhadap kualitas lulusan SMK tersebut.

Khofifah menegaskan bahwa kunci utama lulusan



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, saat di SMKN 1 Buduran, Sidoarjo. (Teddy Syah)

SMK saat ini adalah employability atau kesiapan untuk langsung bekerja. Kemampuan adaptif dinilai lebih penting dari sekadar penguasaan teori. "Punya employability itu sangat penting, artinya mereka siap bekerja di semua lini dan berbagai sektor pembangunan," ujarnya saat kunjungan ke SMKN 1 Buduran, Senin (9/2/2025).

Ia memuji pola pembelajaran yang diterapkan sekolah, yakni satu minggu belajar di kelas dan dua minggu praktik di lapangan. Skema tersebut dinilai efektif membentuk keterampilan nyata siswa.

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Korban dan Pelaku Kecelakan di Alun-alun Lumajang Bisa Berdamai Secara Restorative Justice



Kasat Lantas Akp. Julian Putra Prasviawan, STK, SIK



Kanit Gakkum Ipda Dendy Cucu Andriana, S.H.

LUMAJANG, BN — Laka lantas yang terjadi di alun-alun utara Lumajang hari Jum'at (23/01/2026) jam 10.45 WIB tepatnya dipersimpangan sekitar Bank BNI, yang melibatkan mobil Mitsubishi Xpander Nopol W-1308-RC dan motor Honda Beat Nopol N-6563-DB sampai merengut nyawa warga asal Desa Dorogowok Kec. Tekung berna ma Sri Kurniawati (28 tahun) dan temannya yang dibonceng Ita Pur-

nama Sari (31 tahun) dilaporkan menderita luka berat tengah dalam penanganan medis.

Berdasarkan informasi narasumber, mobil maupun motor melaju dari arah barat ke timur, akibat kurang hati-hati pengendara mobil dan motor, akhirnya terjadi tabrak dari belakang. Kejadian tersebut sudah ditangani dari pihak satuan lalu lintas Polres Lumajang.

Pantauan media BN,

setelah 12 hari terjadi laka lantas tersebut hari Rabu (04/02/2026) kasus lantas AKP. Julian Putra Prasviawan, S.T.K, S.I.K, pada media Bidik Nasional (BN) menyampaikan ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhumah Sri Kurniawati warga desa Dorogowok Kec. Tekung.

"Sampai saat ini masih belum ada laporan dari anggota saya, nanti saya akan hubungi Kanit Gakkum untuk menanyakan hal ini. Kami siap memantau dan memediasi antara korban dan pelaku maunya seperti apa, kalau memang dari keluarga korban tidak menuntut, kami akan mengikuti, kalau dari keluarga korban menginginkan lanjut/menuntut, kami juga siap membantu melanjutkan masalah ini.

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Walikota Probolinggo Perkuat Komitmen Wujudkan Good and Clean Governance

PROBOLINGGO, BN — Inspektorat Kota Probolinggo menggelar Acara Ekspos Hasil Pengawasan Tahun 2025 dan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026, Rabu (4/2), di Ruang Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo.

Ekspos ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pengawasan selama tahun 2025 sekaligus menjaring kebutuhan dari masing-masing perangkat daerah terkait program dan kegiatan strategis tahun 2026 yang memiliki tingkat risiko tinggi. Penyusunan PKPT tetap diselaraskan dengan program kerja yang bersifat mandatori sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri.

Acara ini diikuti kepala perangkat daerah serta Tim Penyusun PKPT Tahun 2026. Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2026 oleh Wali Kota Probolinggo, Penjabat Sekretaris Daerah, Inspektor, dan Kepala BPPKAD sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, dalam arahannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan forum yang sangat serius dan strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia menekankan bahwa good governance hanya dapat terwujud melalui perencanaan yang matang, pengawasan yang kuat, serta komitmen terhadap clean government.

"Perencanaan harus jelas dan kuat. Kita tidak bisa berbicara tata kelola yang baik kalau perencanaannya sendiri tidak jelas. Setelah itu baru dilakukan monitoring, controlling, dan pengawasan. Jika ada penyimpangan, bisa segera dikendalikan," tegasnya.

Wali kota juga mendorong agar seluruh perangkat daerah, khususnya fungsi perencanaan, melakukan evaluasi menyeluruh dan bekerja lebih keras. Lebih lanjut, Dokter Aminuddin mengingatkan pentingnya memperkuat pengawasan internal di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Menurutnya, kekuatan daerah terletak pada kemampuan

Walikota Probolinggo Pimpin Apel Perdana Tahun 2026



Walikota Probolinggo, dr. Aminuddin, saat memimpin apel hari pertama kerja tahun 2026. (ist)

PROBOLINGGO, BN — Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, memimpin apel hari pertama kerja tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Probolinggo, Senin (5/1/2026). Dalam apel tersebut, wali kota menekankan pentingnya meninggalkan pola pikir lama dan menatap tantangan baru dengan semangat serta komitmen yang lebih kuat.

"Kita ulangi ya untuk semangat pagi ini. Ini sudah 2026, mungkin masih ada yang lupa. Selamat pagi!" seru Aminuddin sambil menyapa dan membangkitkan semangat para peserta apel.

Apel perdana tahun ini diikuti Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Penjabat Sekretaris Daerah Rey Suwigtyo, para kepala perangkat daerah, camat, staf di lingkungan Sekretariat Daerah, serta perwakilan perangkat daerah di luar Setda. Bertindak sebagai Komandan Upacara, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo, Aditya Ramadhan Lawado.

Dalam arahannya, Wali Kota Aminuddin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar benar-benar siap menghadapi tahun 2026 dengan cara kerja yang lebih adaptif dan profesional. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Probolinggo sepanjang tahun 2025 yang berhasil meraih 23 penghargaan tingkat nasional dan umum.

"Penghargaan-penghargaan itu sampai penuh. Ini menjadi tanda bahwa ke depan kita perlu menyiapkan ruang yang lebih layak," ujarnya. Ia pun mengungkapkan rencana renovasi Kantor Wali Kota pada tahun 2027 agar tampil lebih megah dan representatif.

Aminuddin menjelaskan, tahun 2026 akan menjadi era penguatan kinerja berbasis evaluasi dan pemantauan berkala. Seluruh kinerja, mulai dari tingkat kelurahan hingga perangkat daerah, akan dipantau secara rutin melalui dashboard kinerja.

"Ke depan, kinerja tidak lagi menunggu akhir tahun. Dalam hitungan bulan bahkan minggu, semua akan terpantau. Bukan untuk menekan, tetapi memastikan target tercapai," tegasnya.

Ia optimistis, apabila setiap perangkat daerah mampu mencapai minimal 80 persen target kinerja, maka jumlah penghargaan yang diraih Kota Probolinggo pada 2026 dapat meningkat hingga 50 penghargaan atau lebih. "Tidak perlu ngoyo, jalani tugas pokok dan fungsi dengan konsisten," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, wali kota juga memaparkan sejumlah proyek strategis yang mulai menunjukkan progres di tahun 2026. Di antaranya pembukaan kembali Alun-Alun Kota Probolinggo pada 10 Januari, pengembangan kawasan Soekarno-Hatta, revitalisasi GOR Ahmad Yani, pembangunan Kawasan Cokro, serta meningkatnya minat investasi swasta yang mulai melakukan studi lokasi di Kota Probolinggo.

Menutup arahannya, Wali Kota Aminuddin mengajak seluruh peserta apel untuk terus menjaga semangat pengabdian dalam mewujudkan visi "Probolinggo Bersolek". Ajakan tersebut dikukuhkan dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar secara serentak dan penuh semangat.

Apel perdana ini menjadi penanda bahwa tahun 2026 bukan sekadar pergantian kalender, melainkan awal langkah besar menuju perubahan nyata bagi Kota Probolinggo. Dengan semangat baru, kolaborasi, dan komitmen bersama, Pemerintah Kota Probolinggo optimistis mampu menghadirkan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (SON)



menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional, didukung sistem perencanaan, monitoring, dan pengawasan yang terintegrasi. "Inspektorat harus memiliki tools yang kuat. Pengawasan dan diskusi harus tetap berada pada jalurnya, agar hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Probolinggo ke depan semakin terarah, berbasis risiko, serta mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (Son)



TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

PEMIMPIN UMUM : Pudji Leksono. **PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB :** Edy Sutanto. **PEMIMPIN PERUSAHAAN :** Teddy Syah Roni. **PENASEHAT HUKUM :** Yustinus Haryanto, SH. **REDAKTUR PELAKSANA :** Budi Santoso. **REDAKTUR :** A Karim, EM Liswandi, Zaenal Ikhsan, Agus. **TIM LIPUTAN KHUSUS :** Toddy Pras Hendarto (Koordinator), Suprawoto, Suwoto, Supardi. **JAWA TIMUR :** SURABAYA : Dynas Ma'rufi Santoso, Abd Rossi, Ninik Rachmawati. **SIDOARJO :** Nur Yahya. **GRESIK :** Ariadi AM, Subkan Arif. **MALANG :** Anur Halis. **SUMENEP :** Adi Yusman, Ishak. **SAMPANG :** Hoillurohman. **MOJOKERTO :** Husnur. **JOMBANG :** Totok Agus Hariyanto (Kabiro), Devi Setiowini. **NGAWI :** Dodik Andriyanto. **KEDIRI :** Nyoto Dharmawan. **TULUNGAGUNG/ TRENGALEK :** Nik Atin. **MADIUN :** Basuki. **NGAWI :** Kasat Lantas Akp. Julian Putra Prasviawan, STK, SIK

KANIT GAKKUM IPDA DENDY CUCU ANDRIANA, S.H.

KASAT LANTAS AKP. JULIAN PUTRA PRASVIAWAN, STK, SIK

LUMAJANG, BN — Laka lantas yang terjadi di alun-alun utara Lumajang hari Jum'at (23/01/2026) jam 10.45 WIB tepatnya dipersimpangan sekitar Bank BNI, yang melibatkan mobil Mitsubishi Xpander Nopol W-1308-RC dan motor Honda Beat Nopol N-6563-DB sampai merengut nyawa warga asal Desa Dorogowok Kec. Tekung berna ma Sri Kurniawati (28 tahun) dan temannya yang dibonceng Ita Pur-

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

PROBOLINGGO, BN — Inspektorat Kota Probolinggo menggelar Acara Ekspose Hasil Pengawasan Tahun 2025 dan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026, Rabu (4/2), di Ruang Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo.

Ekspos ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pengawasan selama tahun 2025 sekaligus menjaring kebutuhan dari masing-masing perangkat daerah terkait program dan kegiatan strategis tahun 2026 yang memiliki tingkat risiko tinggi. Penyusunan PKPT tetap diselaraskan dengan program kerja yang bersifat mandatori sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri.

Acara ini diikuti kepala perangkat daerah serta Tim Penyusun PKPT Tahun 2026. Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2026 oleh Wali Kota Probolinggo, Penjabat Sekretaris Daerah, Inspektor, dan Kepala BPPKAD sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Wali kota juga mendorong agar seluruh perangkat daerah, khususnya fungsi perencanaan, melakukan evaluasi menyeluruh dan bekerja lebih keras. Lebih lanjut, Dokter Aminuddin mengingatkan pentingnya memperkuat pengawasan internal di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Menurutnya, kekuatan daerah terletak pada kemampuan

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

PROBOLINGGO, BN — Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, dalam arahannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan forum yang sangat serius dan strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia menekankan bahwa good governance hanya dapat terwujud melalui perencanaan yang matang, pengawasan yang kuat, serta komitmen terhadap clean government.

"Perencanaan harus jelas dan kuat. Kita tidak bisa berbicara tata kelola yang baik kalau perencanaannya sendiri tidak jelas. Setelah itu baru dilakukan monitoring, controlling, dan pengawasan. Jika ada penyimpangan, bisa segera dikendalikan," tegasnya.

Wali kota juga mendorong agar seluruh perangkat daerah, khususnya fungsi perencanaan, melakukan evaluasi menyeluruh dan bekerja lebih keras. Lebih lanjut, Dokter Aminuddin mengingatkan pentingnya memperkuat pengawasan internal di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Menurutnya, kekuatan daerah terletak pada kemampuan

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

PROBOLINGGO, BN — Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, memimpin apel hari pertama kerja tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Probolinggo, Senin (5/1/2026). Dalam apel tersebut, wali kota menekankan pentingnya meninggalkan pola pikir lama dan menatap tantangan baru dengan semangat serta komitmen yang lebih kuat.

"Kita ulangi ya untuk semangat pagi ini. Ini sudah 2026, mungkin masih ada yang lupa. Selamat pagi!" seru Aminuddin sambil menyapa dan membangkitkan semangat para peserta apel.

Apel perdana tahun ini diikuti Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Penjabat Sekretaris Daerah Rey Suwigtyo, para kepala perangkat daerah, camat, staf di lingkungan Sekretariat Daerah, serta perwakilan perangkat daerah di luar Setda. Bertindak sebagai Komandan Upacara, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo, Aditya Ramadhan Lawado.

Dalam arahannya, Wali Kota Aminuddin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar benar-benar siap menghadapi tahun 2026 dengan cara kerja yang lebih adaptif dan profesional. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Probolinggo sepanjang tahun 2025 yang berhasil meraih 23 penghargaan tingkat nasional dan umum.

"Penghargaan-penghargaan itu sampai penuh. Ini menjadi tanda bahwa ke depan kita perlu menyiapkan ruang yang lebih layak," ujarnya. Ia pun mengungkapkan rencana renovasi Kantor Wali Kota pada tahun 2027 agar tampil lebih megah dan representatif.

Aminuddin menjelaskan, tahun 2026 akan menjadi era penguatan kinerja berbasis evaluasi dan pemantauan berkala. Seluruh kinerja, mulai dari tingkat kelurahan hingga perangkat daerah, akan dipantau secara rutin melalui dashboard kinerja.

"Ke depan, kinerja tidak lagi menunggu akhir tahun. Dalam hitungan bulan bahkan minggu, semua akan terpantau. Bukan untuk menekan, tetapi memastikan target tercapai," tegasnya.

Ia optimistis, apabila setiap perangkat daerah mampu mencapai minimal 80 persen target kinerja, maka jumlah penghargaan yang diraih Kota Probolinggo pada 2026 dapat meningkat hingga 50 penghargaan atau lebih. "Tidak perlu ngoyo, jalani tugas pokok dan fungsi dengan konsisten," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, wali kota juga memaparkan sejumlah proyek strategis yang mulai menunjukkan progres di tahun 2026. Di antaranya pembukaan kembali Alun-Alun Kota Probolinggo pada 10 Januari, pengembangan kawasan Soekarno-Hatta, revitalisasi GOR Ahmad Yani, pembangunan Kawasan Cokro, serta meningkatnya minat investasi swasta yang mulai melakukan studi lokasi di Kota Probolinggo.

Menutup arahannya, Wali Kota Aminuddin mengajak seluruh peserta apel untuk terus menjaga semangat pengabdian dalam mewujudkan visi "Probolinggo Bersolek". Ajakan tersebut dikukuhkan dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar secara serentak dan penuh semangat.

Apel perdana ini menjadi penanda bahwa tahun 2026 bukan sekadar pergantian kalender, melainkan awal langkah besar menuju perubahan nyata bagi Kota Probolinggo. Dengan semangat baru, kolaborasi, dan komitmen bersama, Pemerintah Kota Probolinggo optimistis mampu menghadirkan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (SON)

Gus Son : Tenang Hati Agar Introspektif dan Senantiasa Mengagungkan-NYA Maka Raihlah Kemenangan



H. Mohammad Sonhaji, S.Sos, atau yang biasa dipanggil Gus Son (Subhan Arif)

GRESIK, BN - Senantiasa pitutur jawa terlontarkan dan bahkan selalu menghiasi percakapan. Awal bulan Desember Tahun 2025 di ruang kerjanya, H. Mohammad Son-

haji, S.Sos, atau yang biasa dipanggil Gus Son.

Gus Son, Kepala Desa (Kades) Surowiti Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, yang juga sebagai pemangku Padepokan Alam Tunggal. Akrab, boleh dibilang demikian hubungan dengan awak media Cetak & Online Bidik Nasional (BN).

Terungkap kata Imam Syafi'i, bahwa dua prihal di alam kehidupan dunia ini yang paling berharga

dan paling tidak berharga, yaitu nasihat.

Berharap oleh-oleh dari pada beliaunya Gus Son, yaitu yang berupa sebuah petuah nasihat Jawa dan dapat disajikan ketengah-tengah publik sebagai karya jurnalistik, dalam rangka melengkapi keberagaman budaya bangsa.

Ning, atau hati yang tenang, sebagai respon dalam menyikapi apapun program dan kebijakan pemerintah pusat, menjadikan awal percakapan.

"Neng, diam dan senantiasa instropeksi diri, serta mengamati terlebih memahami situasi dan ke-

adaan yang sedang berjalan atau berlangsung," tutur Gus Son.

"Nong, jangan sampai terlepas hati dalam mengingat Kuasa-NYA yang dibarengi dengan senantiasa mengagungkan Ke-hendak-NYA," tegas Gus Son.

"Nang, maka kemenangan atau kewenangan dapat diraih dan teraih sebagai hasil dan amanat yang dipercayakan dari-NYA," pungkasnya.

Sebagai informasi, H. Mohammad Sonhaji, S.Sos, adalah seorang pewaris kitab dari Kanjeng Sunan Kalijaga. (Bersambung pada artikel berikutnya/Subhan Arif)

Pagelaran Seni Tari dan Budaya Meriahkan HUT SMKN 1 Magetan



Tampak Pagelaran Seni Tari dan Budaya hibur pengunjung HUT SMKN 1 Magetan. (ashar)

MAGETAN, BN - HUT 37 Tahun SMK Negeri 1 Kabupaten Magetan dalam pembukaan di Gedung Olahraga Kimaget, Senin 2 Februari 2026 para siswa-siswi menampilkan berbagai atraksi seni tari dan budaya yang memukau para tamu undangan yang hadir saat itu.

Nur Ikhwan menyampaikan bahwa program acara HUT yang diselenggarakan Tahun 2026 itu mengambil tema "Thesovoria" yang mengandung arti "Satukan Olahraga dalam Kreativitas Pelajar".

"Gelar kali ini yang diselenggarakan oleh SMKN 1 Magetan yang diawali tadi dengan berbagai tarian dan dibuka oleh Sekertaris Daerah Magetan, Welly Krisanto dengan pemukulan Gong dan penyelenggaraan event olahraga di mulai hari ini hingga 6 Februari 2026, hari Jum'at besok serta penutupan seluruh kegiatan pada hari Sabtu (7/2)," kata Nur Ikhwan.

Welly Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Welly mengucapkan bahwa event penyelenggaraan olahraga

Bola Volly dan Futsal diharapkan dapat menjalin keakraban antar sekolah sehingga mereka bisa menimbulkan rasa solidaritas dan sportivitas dalam suasana keakraban bertanding.

"Pentas Seni tadi yang tadi telah ditampilkan para siswa-siswi sangat bagus dan memukau dalam HUT ke 37 SMKN 1 Magetan. Luwes dalam gerak mengikuti irama musik sehingga kami menyaksikan tadi memberikan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan Kepala Sekolah SMKN 1 Magetan," ucap Welly.

Penyelenggaraan pembukaan HUT SMKN 1 Magetan di Gedung Olahraga Kimaget pada hari pertama tadi sudah membawa senyuman bagi para penjual & UMKM di halaman GOR dan bagaimana hingga penutupan pada hari Sabtu, 7 Februari 2026 besok sama dengan penjualan hari ini, saat BN mendekati beberapa penjual dengan nada yang sama dan senyum penuh bahagia. (Ashar)

DPRD Pamekasan Gelar Rapat Paripurna Bahas Penjelasan Bupati Terkait 4 Raperda



Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pamekasan. (ist)

PAMEKASAN, BN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna tentang penjelasan bupati terkait 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang di usulkan oleh eksekutif pemerintah kabupaten Pamekasan tahun 2026.

Rapat paripurna yang berlangsung kali ini dibuka langsung ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur dan dihadiri oleh bupati Pamekasan Dr Kholidurrahman SH, M.Si juga seluruh pimpinan OPD dan Camat se-kabupaten Pamekasan (Rabu 11/02/2026).

Dalam penjelasan bupati Pamekasan Dr Kholidurrahman, SH, M.Si menyampaikan 4 Raperda yang diusulkan oleh eksekutif itu terdiri dari rancangan peraturan daerah (Raperda) antara lain: pertama ; tentang rancangan pembentukan dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2029, kedua ; rancangan transformasi digital dan ketiga; rancangan perubahan ketiga atas peraturan daerah (perda) No 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah tentang pembentukan dana cadangan, dengan mempertimbangkan pemilihan kepala daerah sebelumnya, dimana pelaksanaan pemilihan Pilkada merilukan biaya yang cukup besar sehingga diperlukan dana cadangan setiap tahunnya, agar tidak memberatkan APBD pada tahun pelaksanaan Pilkada tersebut.

Terkait Raperda tentang transformasi digital bertujuan untuk mengatur dan mendorong pemanfaatan teknologi digital

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik juga sebagai landasan hukum dalam mendukung pencapaian visi misi dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun rancangan perubahan ketiga atas peraturan daerah (perda) No 6 tahun 2016 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 60 disebutkan bahwa masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun, sehingga berdasarkan siklus tersebut, maka pemilihan kepala daerah berikutnya dilaksanakan pada tahun 2029. Sedangkan dalam pasal 80 ayat 5 Peraturan Pemerintah (PP) No 12 tahun 2019 tentang pengeleolaan keuangan daerah disebutkan bahwa pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan, dengan mempertimbangkan pemilihan kepala daerah sebelumnya, dimana pelaksanaan pemilihan Pilkada merilukan biaya yang cukup besar sehingga diperlukan dana cadangan setiap tahunnya, agar tidak memberatkan APBD pada tahun pelaksanaan Pilkada tersebut.

Terkait Raperda tentang transformasi digital bertujuan untuk mengatur dan mendorong pemanfaatan teknologi digital

jurusan.

Sedangkan rancangan pengelolaan barang milik daerah yang dimaksud yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan persediaan sarana dan prasarana yang memadai dengan terkelola yang baik dan efektif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara milik daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 28 tahun 2020 tentang perubahan atas pemerintah No 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau milik daerah dan Peraturan Dalam Negeri (Permedagri) No 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Hal itu juga sebagaimana Peraturan Dalam Negeri (Permedagri) No 7b tahun 2024. Maka dari itu, rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengamanan barang milik daerah dan memberikan jaminan kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.

"Inilah beberapa makna yang dapat kami sampaikan, kami harapkan tidak mengurangi makna dari nota penjelasan ini. terima kasih atas segala perhatian semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian di masa-masa yang akan datang," pungkasnya. (kholis)

Bupati Sumenep Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Bogor



Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo.

SUMENEP, BN - Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo dan Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim ,MH. menghadiri rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah anggaran tahun ini (2026) di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa

Barat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor. (2/2/2026).

Dalam kehadiran bupati dan Wabup tersebut menjadi momentum untuk kemajuan Pemerintah Sumenep bahwa selalu siap menjalankan kebijakan strategis nasional yaitu program presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto)

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sumenep Achmad Dzulkarnain, mengharap se energi antara lembaga eksekutif, legislatif, tokoh masyarakat ikut mendukung mengusulkan program Pemerintah pusat yang dititik beratkan kepada Pemerintah Daerah. Semoga program tersebut menjadi fondasi yang kokoh berjalan efektif serta menciptakan kondisi daerah yang kondusif. Dengan kata lain bisa mendorong perluasan penciptaan pengrajin kota keris sehingga meluas kepada Daerah -Daerah lain atau bisa ke manca negara lain. Dalam artian komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi, kolaborasi, dan soliditas nasional demi percepatan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan

Rakornas berlangsung khidmat namun sarat energi kebangsaan. Suasana aula SICC membawa saat Presiden Prabowo memasuki ruang pertemuan diiringi lagu "Maju Tak Gentar", dilanjutkan dengan Indonesia Raya yang menggema dan menegaskan semangat persatuan nasional. Nuansa kebangsaan semakin menguat ketika video inspiratif bertajuk "Indonesia Berdikari" ditayangkan, menampilkan capaian, strategi, serta arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sambutan Presiden Prabowo menegaskan bahwa persatuan lintas golongan serta koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama menjaga keadautan bangsa sekaligus mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kita boleh berbeda golongan, tetapi harus bersatu dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur yang merata," tegas Presiden Prabowo.

Arahan Presiden tersebut disambut serius oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan kesiapan daerahnya untuk menindaklanjuti kebijakan pusat secara konkret dan terukur. (yus)

Ribuan Buruh Tani dan Rokok Gelar Demo, Bawa 8 Tuntutan Ke Kantor Bupati Pamekasan



Bupati Pamekasan Kholidurrahman ketika menerima demo buruh.

PAMEKASAN, BN - Ribuan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) melakukan aksi demonstrasi di kantor Bupati Pamekasan, Selasa (10/2/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi petani tembakau dan buruh pabrik rokok lokal Madura terhadap kebijakan pemerintah dan aktivitas sejumlah lembaga yang dinilai meresahkan terhadap aktifitas mereka.

Dalam aksi tersebut, mereka ditemui Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Kapolres Pamekasan, dan pihak dari Bea Cukai Madura. Dalam orasinya, salah satu orator aksi, Halili menyampaikan bahwa, sebagai representasi petani, buruh, dan pelaku ekonomi rakyat, pihaknya menyatakan sikap tegas terhadap berbagai praktik aktivitas oknum kelembagaan Lemba Swadaya Masyarakat (LSM) yang meresahkan terhadap aktifitas mereka. (kholis)

Peringati HPN 2026 Waka Polresta Banyuwangi Ngopi Bareng dengan Insan Pers



Waka Polresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyo Wasono, S.I.K., saat ngopi bareng dengan Insan Pers. (ist)

BANYUWANGI, BN - Polresta Banyuwangi menggelar tasyakuran dan silaturahmi dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 dengan konsep ngopi bareng bersama insan pers, bertempat di Hotel Aston Banyuwangi. Selasa (9/2/2026)

Kegiatan ini mengungkap tema nasional "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat", sebagai komitmen bersama memperkuat kemitraan strategis antara Polri dan media.

Suasana hangat dan penuh keakraban terasa sejak awal kegiatan. Jajaran Polresta Banyuwangi duduk bersama para pimpinan organisasi pers, pimpinan redaksi, dan wartawan dari berbagai platform media, berdiskusi santai namun sarat makna mengenai peran pers di era digital serta kontribusinya dalam menjaga stabilitas daerah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyo Wasono, S.I.K., didampingi Pejabat Utama (PJU) Polresta Banyuwangi. Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Banyuwangi Ibu Dini, sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Sejumlah tokoh pers Banyuwangi tampak hadir, di antaranya Ketua PWI Budi Wirianto, Ketua IJTI Samsul Arifin, Rumah Kebangsaan Hakim Said, Ketua Seblang Erwin, serta pimpinan berbagai organisasi media lainnya, termasuk Ketua FRN, IWB, IWOI, PW MOI, KJKT, SMSI, dan Ganesh. Ratusan insan pers memenuhi ruang Hall Aston Banyuwangi.

Dalam sambutannya, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Dr. Rofiq Ripto Himawan, S.I.K., S.H., M.H., yang diwakili Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyo Wasono, S.I.K., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada insan pers atas peran dan kontribusinya dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). "Selamat Hari Pers Nasional 2026 kepada seluruh rekan-rekan media. Kami berharap pers di Banyuwangi terus menjadi pers yang sehat, yakni pers yang menyajikan informasi akurat, berimbang, edukatif, dan tidak provokatif," ujar AKBP Teguh. (DjYdh)



Tandatangani SPJ Meski Pekerjaan Fisik Belum Rampung, Tata Kelola Desa Purwajaya Disorot



Kegiatan Musdes Desa Purwajaya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis. (asep)

CIAMIS, BN – Penetapan dan pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026 Desa Purwajaya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, justru menyengkap persoalan serius terkait tata kelola keuangan desa pada tahun anggaran sebelumnya.

Kegiatan yang dihadiri 9 anggota BPD, unsur LPM, RT/RW, serta tokoh masyarakat dengan total sekitar 45 peserta tersebut, merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Dusun (Musdus). Namun, Kepala Desa Purwajaya,

Haji Sanenudin, terpantau absen dalam agenda strategis ini karena dikabarakan tengah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis.

Usai kegiatan, Ketua BPD Desa Purwajaya, Miswanto, memberikan pengakuan mengejutkan terkait pengrajan fisik tahun anggaran 2025. Ia membenarkan bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) telah ditandatangani meskipun pekerjaan di lapangan belum sepenuhnya selesai.

Miswanto berdalih langkah tersebut diambil demi kelancaran siklus

anggaran. Menurutnya, jika SPJ tidak segera ditandatangani, dikhawatirkan pencairan anggaran tahap berikutnya akan terhambat. Ia mengakui adanya ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dengan kondisi riil di lapangan. "Penandatanganan SPJ dilakukan agar anggaran berikutnya tetap dapat turun," ujar Miswanto saat dikonfirmasi awak media.

Dikatakan, kasus ini kini menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas Desa Purwajaya di tengah proses perencanaan RKPDes 2026.

Mewakili masyarakat sebut sumber itu, ia berharap adanya pemberhanan nyata agar administrasi desa tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar mencerminkan integritas tata kelola keuangan negara. Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Purwajaya, Haji Sanenudin, belum dapat dimintai keterangan. Upaya konfirmasi yang dilakukan bidiknasional.com belum membawa hasil lantaran yang bersangkutan dikabarkan masih fokus menghadapi pemeriksaan tim Inspektorat Kab Ciamis.

(Asep Sujana)

Laskar Bahurekso Sakti Bongkar Dugaan Kejanggalan Pengelolaan Pabrik Es Batu Sigandu

BATANG, BN – Lembaga Laskar Bahurekso Sakti secara tegas menyebut dugaan kejanggalan dalam pengelolaan Pabrik Es Batu yang berlokasi di kawasan Pantai Sigandu, Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang. Pabrik tersebut diketahui dikelola oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Batang Cemerlang dan berdiri di atas aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Batang. Sorotan utama mencakup persoalan legalitas perizinan, pemanfaatan aset daerah, serta kejelasan kerja sama dan mekanisme bagi hasil yang dinilai tidak transparan.

Ketua Umum Laskar Bahurekso Sakti, Kiswandi, mengungkapkan bahwa temuan tersebut muncul setelah pihaknya melakukan serangkaian klarifikasi ke sejumlah instansi terkait. Namun, alih-alih memperoleh kejelasan, justru ditemukan adanya saling lempar tanggung jawab antar pihak. "Dari hasil klarifikasi yang kami lakukan, tidak ada satu pun instansi yang secara tegas menyatakan bertanggung jawab atas perizinan, aset, dan mekanisme bagi hasil pengelolaan pabrik es tersebut," ujar Kiswandi.

Klarifikasi awal dilakukan kepada pihak KSU Batang Cemerlang. Dalam keterangannya, Hakim selaku penanggung jawab KSU Batang Cemerlang menyampaikan bahwa seluruh urusan perizinan dan mekanisme bagi hasil dengan Pemerintah Kabupaten Batang telah diserahkan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Batang.

Namun, pernyataan tersebut justru bertolak belakang dengan hasil konfirmasi di lapangan. Pada 9 Februari 2026, Laskar Bahurekso Sakti mendatangi langsung Disperindagkop Kabupaten Batang. Kepala Bidang Koperasi Disperindagkop menyatakan tidak mengetahui adanya pengelolaan perizinan maupun skema bagi hasil sebagaimana dimaksud.

Disperindagkop menegaskan bahwa kewenangannya hanya terbatas pada pembinaan dan pengawasan koperasi. Sementara urusan aset daerah serta keuangan dan bagi hasil berada di bawah kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Batang.

Menindaklanjuti hal tersebut, Laskar Bahurekso Sakti kemudian melakukan klarifikasi ke BPKAD Kabupaten Batang. Dari pertemuan tersebut, BPKAD mengakui telah menerima pengajuan perpanjangan sewa lahan dari KSU Batang Cemerlang. Namun setelah dilakukan penilaian (appraisal), pengajuan tersebut dinyatakan tidak dapat diproses karena dokumen yang diajukan belum lengkap.

Ironisnya, meski perjanjian sewa lahan seluas 13.289 meter persegi dengan Nomor Surat 551/0521/2006 telah berakhir pada Oktober 2024 dan belum diperpanjang secara sah, Pabrik Es Batu tersebut diketahui masih tetap beroperasi hingga saat ini.

"Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius. Di atas aset milik daerah yang masa sewanya sudah berakhir dan belum diperpanjang secara legal, kegiatan usaha tetap berjalan tanpa kejelasan dasar hukum," tegas Kiswandi.

Selain persoalan sewa aset, Laskar Bahurekso Sakti juga menyebut mekanisme kerja sama bagi hasil dengan Pemerintah Kabupaten Batang. Dalam perjanjian kerja sama disebutkan adanya penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp350 juta dengan kewajiban bagi hasil sebesar 15 persen. Namun, BPKAD

rat. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan pada fungsi pengawasan BPD serta tanggung jawab eksekutif pemerintah desa dalam mengelola dana publik.

Dikatakan, kasus ini kini menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas Desa Purwajaya di tengah proses perencanaan RKPDes 2026.

Mewakili masyarakat sebut sumber itu, ia berharap adanya pemberhanan nyata agar administrasi desa tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar mencerminkan integritas tata kelola keuangan negara. Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Purwajaya, Haji Sanenudin, belum dapat dimintai keterangan. Upaya konfirmasi yang dilakukan bidiknasional.com belum membawa hasil lantaran yang bersangkutan dikabarkan masih fokus menghadapi pemeriksaan tim Inspektorat Kab Ciamis.

(Asep Sujana)



Pabrik Es Batu yang berlokasi di kawasan Pantai Sigandu, Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang. (Dikin)

Kabupaten Batang mengaku tidak mengetahui keberadaan maupun alur setoran bagi hasil 15 persen tersebut.

BPKAD hanya mencatat adanya pembagian dalam bentuk dividen saham, bukan skema bagi hasil sebagaimana yang diklaim telah disetorkan setiap tahun oleh pihak KSU

Batang Cemerlang. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan kerja sama antara koperasi dan pemerintah daerah.

"Jika benar bagi hasil 15 persen itu rutin disetorkan setiap tahun, seharusnya tercatat secara resmi di BPKAD sebagai pengelola keuangan daerah. Pertanyaannya, ke mana aliran dana tersebut selama ini?" ujar Kiswandi.

Atas berbagai temuan tersebut, Laskar Bahurekso Sakti mendesak Pemerintah Kabupaten Batang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional Pabrik Es Batu KSU Batang Cemerlang. Evaluasi dinilai penting guna mencegah potensi kerugian keuangan daerah serta memastikan pengelolaan aset daerah berjalan sesuai ketentuan hukum.

Kiswandi menegaskan, apabila tidak ada kejelasan terkait perizinan, sewa aset, dan mekanisme bagi hasil yang disampaikan secara terbuka kepada publik, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menempuh langkah lanjutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami tidak ingin aset daerah dikelola tanpa kepastian hukum dan tanpa kejelasan manfaat bagi daerah. Transparansi adalah kunci, dan Pemkab Batang harus hadir untuk menjawab persoalan ini secara terang benderang," pungkasnya.

Sementara itu, Manajer KSU Batang Cemerlang, Hakim, memberikan klarifikasi saat ditemui di lokasi pabrik. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya bertanggung jawab pada aspek operasional produksi dan pemasaran serta berstatus sebagai karyawan koperasi. "Untuk perizinan koperasi semuanya sudah ada dan sesuai OSS. Tidak ada alih fungsi usaha. KSU Batang Cemerlang bergerak di bidang pabrik es balok," ujarnya.

Hakim menambahkan bahwa urusan administrasi kelembagaan, termasuk Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan pelaporan ke dinas, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus koperasi. "RAT ada, laporan ke dinas juga ada. Jika membutuhkan data lebih lengkap, silakan langsung ke dinas terkait," katanya.

Terkait penggunaan air tanah, Hakim menyebutkan bahwa pengambilan air dilakukan melalui pengeboran dan telah mengantongi izin resmi. Ia juga menjelaskan bahwa lahan pabrik merupakan lahan sewa yang berada di bawah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan.

"Saya mulai bekerja di sini tahun 2012, dan pabrik sudah beroperasi sejak 2007. Soal perpanjangan sewa lahan sudah diajukan sejak tahun lalu dan masih dalam proses. Selama belum ada keputusan resmi, kegiatan produksi tetap berjalan," jelasnya.

Mengenai hasil 15 persen untuk Pemerintah Kabupaten Batang, Hakim menegaskan bahwa pembagian tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama atau MoU yang telah disepakati sejak 2006. "Setelah RAT, ada SHU dan pembagian sesuai MoU. Setoran itu masuk ke Pemkab melalui BPKAD," pungkasnya. (Dikin)

GNPK RI Soroti Peredaran Rokok Ilegal di Pekalongan



Rokok ilegal yang ditemukan GNPK RI Pekalongan Raya.

17.00 | 09/02/2026

PEKALONGAN, BN – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Pekalongan Raya menyoroti tajam darurat peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Kota Pekalongan. Praktik ini dinilai bukan sekedar pelanggaran administratif, melainkan ancaman serius yang berpotensi merugikan pendapatan negara dalam skala besar.

Ketua GNPK RI Pekalongan Raya, Zaenuri, menegaskan bahwa peredaran rokok bodong merupakan pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Ia mendesak agar pola penindakan yang selama ini dilakukan dievaluasi total.

"Negara dirugikan, dan masyarakat juga dirugikan karena barang yang beredar tidak melalui pengawasan resmi. Jika penindakan hanya berakhir pada sanksi denda dan setelah itu aktivitas penjualan tetap berjalan, maka efektivitas penegakan hukumnya patut dipertanyakan," tegas Zaenuri saat memberikan keterangan kepada awak media.

Penelusuran GNPK RI mengindikasikan adanya celah yang dimanfaatkan oknum pedagang untuk terus beroperasi meski telah terkena razia. Zaenuri meyakini bahwa peredaran ini tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan jaringan distribusi yang terorganisir. "Ini bukan pelanggaran kecil. Biasanya ada jaringan besar di belakangnya. Aparat perlu menelusuri sampai ke hulunya, jangan hanya menyarang pengecer di tingkat bawah," tambahnya.

Sorotan GNPK RI ini sejalan dengan pengakuan Kepala Bidang Penegakan Perda (Gakda) Satpol PP Kota Pekalongan, Agung Jaya. Meski rutin menggelar operasi bersama Bea Cukai menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), ia mengakui para pelaku kerap bermain "kucing-kucing".

"Peredarnya sulit dilacak karena sumber pabriknya berada di luar wilayah. Kami pun mengakui, kalau hanya denda, dampak efek jeranya memang belum terasa signifikan," ujar Agung.

Dalam operasi terbaru di kawasan Pringlangu dan Jalan Hos Cokroaminoto, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang kemudian diserahkan ke Bea Cukai Semarang. Namun, sesuai regulasi, jika pelaku telah membayar denda administrasi sebesar tiga kali nilai cukai, maka unsur pidana biasanya tidak dilanjutkan.

Guna memutus rantai peredaran, GNPK RI mengimbau masyarakat untuk lebih proaktif mengenali ciri-ciri rokok ilegal tidak memiliki pita cukai (polos), menggunakan pita cukai palsu atau bekas dan ita cukai tidak sesuai peruntukan (salah personalisasi). "Kami mengajak masyarakat untuk tidak membeli rokok ilegal dan segera melapor jika menemukan indikasi peredaran di lingkungannya. Pengawasan publik adalah kunci utama pencegahan korupsi di sektor pendapatan negara ini," pungkas Zaenuri. (Dikin)

Jembatan Gantung Penghubung Sidaharja-Bantardawa Terancam Putus, Warga Minta BBWS Citanduy Bertindak



Petugas sedang mengecek jembatan Penghubung Sidaharja-Bantardawa yang terancam putus. (asep sujana)

CIAMIS, BN – Akses utama berupa jembatan gantung yang menghubungkan Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, dengan Desa Bantardawa yang berada di kecamatan purwadadi di Kabupaten Ciamis, kini berada dalam kondisi kritis.

Struktur jembatan tersebut terancam akibat abrasi tebing Sungai Ciseel dengan cuaca intensitas hujan yang sangat tinggi yang terus terjadi di wilayah Priangan timur.

Jembatan gantung ini merupakan jalur vital bagi aktivitas masyarakat antar desa. Selain menjadi penghubung sosial, jembatan tersebut juga menjadi urat nadi perekonomian warga, terutama bagi para pedagang yang setiap hari melintas menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi masyarakat, mengingat potensi untuk terjadinya bencana alam khususnya di sungai ciseel sangat tinggi.

Salah seorang perangkat Desa Sidaharja, Bpk salim, menyampaikan kekhawatirannya jika abrasi tersebut tidak segera ditangani. "Tidak bisa dibayangkan seandainya jembatan gantung ini robuh akibat abrasi. Akses utama penghubung dua desa bisa mati total dan roda perekonomian masyarakat akan tersendat," ujar salim.

"Kalau jembatan ini putus, warga terpaksa harus memutar jauh ke Banjarsari untuk menuju Pasar Ciawitali Purwadadi atau ke Lakbok. Itu jelas menambah biaya dan waktu," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sidaharja, Haris munandar, meminta untuk segera ditinjau dan penanganan dari pihak BBWS citanduy yang berwenang di sungai ciseel mengingat jembatan gantung tersebut merupakan akses utama dan sangat vital bagi masyarakat desa sidaharja dan desa sekitarnya. (Asep Sujana)

Tanggul Sungai Citalahap Jebol, 25 Hektare Sawah di Sukahurip Terendam Banjir



Tanggul Sungai Citalahap terlihat jebol. (asep sujana)

CIAMIS, BN – Luapan Sungai Citalahap menyebabkan tanggul jebol di wilayah Dusun Kerjataya RT 25 RW 11, Desa Sukahurip, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, pada Senin 9-2 / 2026 dini hari sekitar pukul 04.00 WIB. Akibat kejadian tersebut, sekitar 25 hektare lahan persawahan milik warga terendam air dan lumpur, sehingga berdampak serius terhadap hasil pertanian.

Kepala Desa Sukahurip, Turiman, mengatakan luapan air terjadi secara tiba-tiba sehingga warga tidak sempat menyelamatkan hasil panen. Padi yang siap panen rusak terendam, sementara padi yang sudah dipanen namun belum sempat diangkut ikut hanyut dan tercerer terbawa arus sungai.

"Air masuk dengan cepat ke sawah warga. Banyak padi siap panen rusak, dan

■ Bersambung ke hal.11 kol.5



HARJASDA KE-167

CFD Perdana di Momen Harjasda ke-167 Sidoarjo, Dihadiri 18 Ribu Pengunjung



(Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati pasca buka CFD. (Ist)

SIDOARJO, BN - Euforia Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-167 yang diperlakukan pada 31 Januari lalu menghadirkan momen istimewa bagi masyarakat. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah digelarnya Car Free Day (CFD) di kawasan sekitar Alun-alun Sidoarjo.

Kegiatan tersebut menjadi CFD pertama yang dikemas secara besar dan meriah di pusat kota. Antusiasme warga terlihat sejak pagi hari dengan memadati area kegiatan.

Meski CFD pernah digelar sebelumnya di kawasan tersebut, pelaksanaan kali ini dinilai jauh lebih tertata dan semarak. Skala kegiatan dan jumlah pengunjung meningkat signifikan.

Berdasarkan data pantauan CCTV, jumlah pengunjung mencapai lebih dari 18 ribu orang. Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan ruang publik tanpa kendaraan bermotor.

meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup di daerah.

Kegiatan yang digelar setiap hari Minggu itu diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga. Selain itu juga mendorong pola hidup sehat.

"Ini bentuk komitmen pimpinan daerah untuk memberikan ruang kepada masyarakat agar indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sidoarjo lebih baik. Supaya kita semuanya dapat bersama-sama merawatnya, dalam sambutan pembukaan.

Fenny juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan selama pelaksanaan CFD. Ia menekankan bahwa keberhasilan kegiatan sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat.

Ia meminta para pengunjung tidak membuang sampah sembarangan. Kesadaran kolektif dinilai menjadi kunci keberlanjutan program tersebut.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati, saat melakukan Pembukaan di depan Monumen Jayandran, Alun-alun Sidoarjo.

Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan CFD merupakan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Tujuannya untuk

menurutnya, tidak menutup kemungkinan area CFD akan diperluas. Namun hal itu bergantung pada kemampuan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan.

"Saya berharap bapak ibu yang ikut Car Free Day semuanya sehat, tetap menjaga kebersihan, dan menjaga lingkungan," tambahnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perkonomian dan Pembangunan, Bahrul Amiq, menyebut CFD sebagai bentuk relaksasi kota. Terutama dari dampak pencemaran emisi kendaraan bermotor.

"Kegiatan ini bisa memberi efek positif bagi kualitas udara dan ruang sosial warga, karena tidak dilalui kendaraan bermotor. Perlu diketahui juga, CFD bisa menjadi titik temu aktivitas olahraga dan ekonomi kerakyatan," terang Amiq.

Amiq menilai, animo pelaku UMKM dalam kegiatan itu terbilang sangat tinggi. Banyak pedagang mengaku memperoleh hasil penjualan yang memuaskan.

Sebagian besar pelaku UMKM yang berjualan sudah merupakan warga Sidoarjo. Meski demikian, masih ditemukan sekitar 35 persen pedagang berasal dari luar daerah.

Ke depan, penyelenggara akan melaksanakan pembenahan dan penataan lebih lanjut. Terutama terkait zonasi dan pen-

dataan pedagang.

Dari sisi kebersihan, volume sampah yang dihasilkan cukup besar. Dalam satu kali pelaksanaan CFD, sampah yang terkumpul mencapai sekitar empat truk.

Meski begitu, Pemkab Sidoarjo selaku penyelenggara CFD merasa puas dengan tingginya partisipasi masyarakat. Dampak perputaran ekonomi lokal juga dinilai ikut meningkat.

Diketahui, Sebelumnya Bupati Sidoarjo Subandi telah memberikan izin pelaksanaan CFD di kawasan Alun-alun. Izin tersebut terbit setelah kajian bersama Dishub dan Satpol PP.

Bupati menegaskan pedagang yang berjualan harus merupakan warga Sidoarjo. Ia juga menetapkan batas waktu kegiatan itu hingga pukul 09.00 Wib.

"Agar tidak mengganggu aktivitas umum, saya meminta Satpol PP aktif memberikan imbauan pelaku UMKM di lapangan," ungkap Bupati Sidoarjo, Subandi. (adv)



Suasana CFD Sidoarjo, dipadati ratusan pengunjung. (Ist)

Lebih 500 UMKM Berjualan di CFD Sidoarjo



Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bahrul Amiq. (Foto: Teddy/BN)

SIDOARJO, BN - Asisten II Bidang Perkonomian dan Pembangunan, Bahrul Amiq, menyampaikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan Car Free Day (CFD) pada 8 Februari 2026. Sa-

lah satunya mengenai jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang ikut berjualan di lokasi kegiatan.

Menurut Amiq, jumlah PKL yang tercatat mencapai lebih dari 500 pedagang. Data tersebut

berasal dari hasil pendaftaran petugas selama kegiatan berlangsung.

Ia menjelaskan, selain PKL terdaftar, ada juga warga sekitar lokasi yang terlihat memenuhi lapak. Kondisi itu menjadi salah

satu perhatian panitia di lapangan.

Beberapa warga memiliki pedagang dari luar wilayah justru diperbolehkan berjualan. Sementara warga di sekitar kawasan CFD juga ingin mendapat kesempatan membuka lapak.

"Tapi hal itu memang kita maklumi, agar mereka tidak merasa terdiskriminasi," ujar Amiq. Panitia, kata dia, berupaya menjaga rasa keadilan bagi para pelaku usaha.

Ke depan, pihaknya akan memberikan imbauan lebih tegas kepada pelaku UMKM. Terutama terkait penataan dan pengelolaan limbah selama kegiatan CFD.

Limbah gorengan seperti minyak bekas diminta tidak dibuang ke tanaman. Pembuangan minyak sembarangan dapat merusak dan mematikan tanaman di sekitar area kegiatan.

Panitia juga mendorong

penyebaran brosur promosi di area CFD. Sampah kertas dari brosur dinilai berpotensi berserakan dan menambah volume sampah.

Diakhir, Amiq menjelaskan terkait sampah yang dihasilkan dalam satu kali CFD bisa mencapai empat dump truck.

Pada pelaksanaan CFD pertama, total sampah yang terkumpul tercatat sekitar 4,7 ton.

Bupati Subandi mendukung terlaksananya acara CFD tersebut. Menurutnya, CFD dapat meningkatkan taraf per-

ekonomian UMKM Sidoarjo.

"CFD baik untuk meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Namun dengan catatan, para penjual UMKM harus merupakan warga kita, warga Sidoarjo," ungkap Subandi. (adv)



Suasana para pelaku UMKM di CFD Sidoarjo. (Ist)

Panjang Jalur CFD Sidoarjo Capai 1,6 Km



Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Budi Basuki, saat di CFD Sidoarjo.

SIDOARJO, BN – Panjang jalur Car Free Day (CFD) di Kabupaten Sidoarjo tercatat mencapai sekitar 1,6 kilometer. Total jalan yang digunakan dalam kegiatan tersebut mencapai 1.691 meter. Data dihimpun, bentangan jalur itu mampu menampung lebih dari 500 pelaku UMKM. Area CFD bisa berbagai aktifitas seperti olahraga, rekreasi warga, sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo, Budi Basuki, mengatakan pengukuran dilakukan pada pelaksanaan CFD tanggal 8 Februari 2026. Seluruh ruas dihitung berdasarkan jalan yang ditutup sementara. "Total panjang jalur CFD yang digunakan mencapai sekitar 1,6 kilometer," ujar Budi Basuki.

Ruas jalan yang digunakan meliputi Jalan A. Yani – Yos Sudarso hingga Kombes Pol sepanjang 712,35 meter. Jalur ini menjadi segmen terpanjang dalam rangkaian CFD.

Selain itu, Jalan Cokronegoro (Pendopo) sepanjang 188,53 meter dan Jalan Gubernur Suryo sepanjang 180,84 meter. Kedua ruas ini menjadi titik penghubung arus pengunjung.

Kemudian Jalan Sultan Agung di depan Dispura dan Kantor Pos sepanjang 164,49 meter. Ditambah Jalan Sultan Agung dari depan Lapas hingga depan DPRD sepanjang 190,63 meter. "Masih ditambah Jalan Dr Soetomo samping Lapas dan samping DPRD, sehingga totalnya 1.691,76 meter," jelasnya.

Dishub Sidoarjo juga menyiapkan kantong parkir darurat di sekitar alun-alun. Lahan milik instansi pemerintah telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan saat CFD dilaksanakan.

"Kalau mengandalkan parkir yang ada sekarang, perkiraan belum cukup. Mangkanya kita siapkan kerjasama kantong parkir dengan lahan milik swasta," kata Budi.

Sementara itu, Bupati Subandi pasca mengkaji atas kebermanfaatan CFD itu terhadap masyarakat

di kawasan sekitar Alun-alun Sidoarjo. Dalam pandangannya, untuk perkembangan perekonomian UMKM sangat menarik.

Namun dengan catatan, masyarakat Sidoarjo harus mematuhi aturan-aturan yang telah dikaji oleh Dishub dan Satpol PP. Terutama, ketertiban pelaksanaan CFD. "Pelaku UMKM harus taat peraturan, termasuk maksimal berjalan sampai jam 9 pagi. Agar tidak mengganggu pengguna jalan lain," ungkap Bupati Subandi.

(Teddy)



Warga memadati Alun-alun Sidoarjo saat Car Free Day (CFD).

Komisi IV DPRD Kota Palembang Bergerak Cepat, Usut Keracunan MBG Sejumlah Siswa SMPN 31

PALEMBANG, BN

- Kasus keracunan makanan yang menimpa siswa SMP Negeri 31 Palembang pada 30 Januari 2026 memicu gelombang kemarahan publik. Komisi IV DPRD Kota Palembang bergerak cepat dengan menggelar rapat darurat bersama pihak-pihak terkait, Selasa (3/2/2026), di ruang rapat komisi IV.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palembang, Ali Subri, dan menghadirkan jajaran pejabat serta penyedia Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi sorotan.

Dalam rapat tersebut, hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Affan Mahali Prapanca, Kepala SMPN 31, Kepala Dinas Kesehatan Fenti Aprina, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Sumsel-Jambi Nurya Hartika Sari, perwakilan dapur SPPG, penyedia MBG, ahli gizi, serta sejumlah pihak teknis lainnya.

Ali Subri menegaskan, insiden keracunan bukan akibat kelalaiannya sekolah maupun OPD teknis, melainkan kesalahan fatal dari



Komisi IV DPRD Kota Palembang bergerak cepat dengan menggelar rapat darurat bersama pihak-pihak terkait usut Kasus keracunan makanan yang menimpa siswa SMP Negeri 31 Palembang, Selasa (3/2/2026) di ruang rapat komisi IV. (ist)

dapur SPPG penyedia MBG. "Roti yang dibagikan sudah berjamur dan melewati batas kadaluarsa. Ini tidak bisa ditoleransi," tegasnya.

Sekretaris Komisi IV, Syaiful Padli, mengungkapkan, pengawasan dapur SPPG tidak berjalan maksimal. Dari 170 dapur SPPG di Palembang, 56 di antaranya belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). DPRD memberi tenggat hingga 27 Februari 2026 untuk melengkapi sertifikat, jika tidak maka dapur akan ditutup.

"Kami akan menonaktifkan dapur yang tidak memenuhi standar. Ini langkah tegas demi keselamatan siswa," ujarnya.

Anggota Komisi IV, Andri Adam, mengungkapkan fakta me-

ngejutkan di lapangan. Label kadaluarsa pada roti yang seharusnya 1 Januari 2026 diganti menjadi 1 Februari 2026.

"Ini bukan kelalaihan biasa, melainkan indikasi kesengajaan. Supplier mencetak dan menempel tanggal baru padahal roti sudah berjamur. Ini bukti kuat adanya niat jahat," tegasnya.

Kepala SMPN 31 menuturkan bahwa kasus ini bukan yang pertama. Sebelumnya ditemukan buah busuk, sayur tidak segar, nasi berulat, serta keterlambatan distribusi MBG.

Bahkan pada 9 dan 23 Januari, jumlah makanan yang dikirim hanya 352 paket dari seharusnya 690. Pada 28 Januari, pihak sekolah

juga menemukan nasi berulat, sayur tidak segar, serta buah-buahan busuk.

Fakta ini memperkuat dugaan bahwa penyedia MBG kerap mengabaikan standar kesehatan. DPRD Kota Palembang menegaskan, jika hasil pemeriksaan laboratorium membuktikan adanya unsur kesengajaan, kasus ini akan diproses sesuai hukum, termasuk penerapan Pasal 360 KUHP tentang kelalaihan yang menyebabkan orang sakit atau luka. "Jika terbukti bersalah, harus diproses secara pidana. Ini menyangkut keselamatan anak-anak," tegaskan Ali Subri.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Affan Prapanca, menekankan pentingnya pengawasan berlapis.

Ia meminta sekolah berani menolak makanan yang tidak sesuai standar kesehatan. Khusus di SMPN 31, jumlah guru yang bertugas memeriksa makanan akan ditambah, mengingat jumlah siswa mencapai lebih dari seribu orang. "Kami berharap kontrol seperti ini dilakukan konsisten demi menjaga kesehatan anak-anak penerima manfaat MBG," ujarnya.

Saat ini, laporan resmi dari pihak sekolah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang telah diamankan. Pemerintah Kota Palembang berjanji akan menindaklanjuti temuan ini dengan langkah hukum dan administratif demi mencegah kasus serupa terulang. (Adv/Leo/Yant)



Peringati Hari Jadi Ke 22 OKU Timur, Pemkab Gelar Sriwijaya Open Race

□ Bupati H. Lanosin : Kegiatan Ini Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata serta Pengembangan UMKM

OKU TIMUR, BN

- Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-22 Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten OKU Timur menyelenggarakan Sriwijaya Open Race Bupati OKU Timur Championship dan Motor Exhibition Tahun 2026, yang digelar selama dua hari, Sabtu-Minggu, 31 Januari hingga 1 Februari 2026.



Berbagai momen kegiatan Sriwijaya Open Race Bupati OKU Timur Championship dan Motor Exhibition Tahun 2026, yang digelar selama dua hari, Sabtu-Minggu, 31 Januari hingga 1 Februari 2026 di Sirkuit Non Permanen Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten OKU Timur. Tampak Bupati Ir. H. Lanosin, M.T., M.M, hadir di tengah masyarakat memberi sambutan. (ist)



KEGIATAN ini dipusatkan di Sirkuit Non Permanen Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten OKU Timur dan menjadi salah satu rangkaian agenda peringatan hari jadi daerah yang diikuti oleh ratusan pembalap dari berbagai wilayah.

Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, M.T., M.M. dalam sambutannya menyampaikan, apresiasi atas terselenggaranya Sriwijaya Open Race sebagai event berskala besar yang mampu menarik perhatian masyarakat dan peserta dari luar daerah. Menurutnya, kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta pengembangan UMKM di Kabupaten OKU Timur.

"Dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan dapat diiringi dengan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan bidang UMKM. Insya Allah OKU Timur dapat maju lebih cepat dalam bingkai kemuliaan," ujar Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan

"Kami mengucapkan terima kasih kepada IMI yang telah mempercayakan OKU Timur sebagai tuan rumah. Ini merupakan ajang yang sangat bergengsi dan menjadi kebanggaan bagi daerah," tambahnya.

Ketua Pelaksana kegiatan yang juga Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

ucapan terima kasih kepada IMI yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten OKU Timur sebagai tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan ini.

Kabupaten OKU Timur Nasrul, S.Pd., M.M. dalam laporannya menyampaikan bahwa kejuaraan ini mempertandingkan 25 kelas lomba. Hingga pelaksanaan kegiatan, jumlah peserta yang telah terdaftar mencapai 322 pembalap di seluruh kelas yang dilombakan dan masih berpotensi bertambah.

Disampaikan pula bahwa penyelenggaraan kejuaraan ini tidak hanya bertujuan sebagai ajang kompetisi olahraga otomotif dan hiburan masyarakat, namun juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha lokal dan UMKM.

Melalui pelaksanaan Sriwijaya Open Race Bupati OKU Timur Championship dan Motor Exhibition Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten OKU Timur berharap kegiatan olahraga berskala besar dapat terus dikembangkan sebagai sarana pembinaan prestasi sekaligus penggerak roda perekonomian daerah.

(Adv/Nelis Sri Wahyuni)



Kinerja Kejari Subang Dipertanyakan, Kasus Gratifikasi Oknum Kasi Dinas Pertanian Mangkrak



SUBANG, BN - Penanganan dugaan gratifikasi sebesar Rp70 juta yang diduga melibatkan oknum Kepala Seksi (Kasi) Dinas Pertanian Kabupaten Subang berinisial S kembali menuai sorotan publik. Hingga kini, belum ada kejelasan resmi terkait status hukum perkara tersebut, meskipun telah muncul pengakuan dari pihak yang diduga sebagai pemberi uang.

Sejumlah pihak mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang, khususnya bidang tindak pidana khusus (Pidsus), yang dinilai belum memberikan penjelasan terbuka terkait tindak lanjut dugaan gratifikasi dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) jenis combine harvester tahun anggaran 2023.

Saat dikonfirmasi awak media Bidik Nasional melalui pesan WhatsApp, Kepala Seksi Intelijen Kejari Subang menyampaikan bahwa pihaknya akan menanyakan kembali persoalan tersebut kepada Kasi Pidsus Kejari Subang. "Saya akan tanyakan langsung ke Kasi Pidsus nanti kalau sudah datang," ujarnya singkat.

Pernyataan tersebut justru menambah tanda tanya publik, mengingat perkara ini telah mencuat ke ruang publik sejak beberapa waktu lalu dan bahkan disebut telah dilaporkan ke Komisi Pembenaran Korupsi (KPK) oleh Kepala Desa Kalen Tambo.

Pengakuan Pemberi dan Dugaan Alur Uang Salah seorang warga sekaligus aktivis anti-korupsi menilai bahwa dugaan gratifikasi dalam kasus hal telah memiliki dasar awal yang cukup kuat. Hal tersebut merujuk pada pengakuan JM, yang menyatakan telah menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) secara langsung kepada oknum Kasi Dinas Pertanian berinisial S.

Menurut pengakuan JM kepada awak media, uang tersebut diserahkan dengan alasan untuk kebutuhan kantor Dinas Pertanian, dan penyerahan dilakukan dalam konteks pengurusan bantuan alsintan. JM juga menyebut bahwa penyerahan tersebut diketahui oleh seorang pejabat di Dinas Pertanian bernama Nenden.

"Ini bukan isu tanpa dasar. Ada pengakuan pemberi, ada nominal jelas, ada pihak yang disebut menerima. Tinggal bagaimana aparat penegak hukum membuktikan dan menyampaikannya secara terbuka kepada publik melalui mekanisme hukum yang berlaku."

"Kalau memang tidak cukup bukti, Kejari Subang seharusnya menerbitkan dan mempublikasikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), agar tidak menimbulkan spekulasi dan kegaduhan di

masyarakat," tegasnya.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, terlebih perkara ini menyangkut dugaan penyalahgunaan jabatan dan uang negara.

Tinjauan Regulasi Hukum Terbaru (Update 2026): KKN dan Penyalahgunaan Wewenang

Seiring dengan berlakunya sejumlah pembaruan regulasi hingga tahun 2026, penanganan perkara dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin diperketat.

1. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Berlaku Efektif 2026)

Dalam KUHP Nasional yang mulai berlaku penuh pada 2026, terdapat penguatan norma terkait penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik, khususnya perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain yang merugikan kepentingan umum.

2. UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)

Ketentuan mengenai gratifikasi tetap menjadi rujukan utama, khususnya Pasal 12B dan 12C, yang menyatakan:

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Beban pembuktian dapat beralih kepada penerima gratifikasi untuk membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan suap.

3. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Relevan hingga 2026). Undang-undang ini menegaskan larangan penyalahgunaan wewenang, termasuk: Melampaui kewenangan, Mencampuradukkan kewenangan, dan Bertindak sendang-wenang.

Pejabat yang terbukti menyalahgunakan wewenang dapat dimintai pertanggungjawaban administrasi, perdata, hingga pidana.

Prinsip Akuntabilitas dan Keterbukaan Publik, Dalam konteks bantuan pemerintah, setiap proses penyaluran wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari pungutan liar, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai peraturan sektor, termasuk Peraturan Menteri Pertanian terkait alsintan.

Awak Media Bidik Nasional menegaskan bahwa pemberitaan lanjutan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers, untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum.

Media tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, namun juga menilai bahwa kejelasan sikap dan tindakan aparat penegak hukum menjadi hal yang tidak bisa ditunda.

Perkembangan lebih lanjut terkait sikap resmi Kejari Subang, KPK, maupun pihak-pihak terkait akan terus dipantau dan diberitakan berdasarkan fakta serta keterangan resmi. (M. Tohir/Tim)

Desakan Transparansi dan Kepastian Hukum

Sumber yang sama menegaskan, apabila Kejari Subang menilai perkara tersebut tidak memenuhi unsur pidana atau dinyatakan kekurangan alat bukti, maka seharusnya hal tersebut disampaikan secara terbuka kepada publik melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Kalau memang tidak cukup bukti, Kejari Subang seharusnya menerbitkan dan mempublikasikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), agar tidak menimbulkan spekulasi dan kegaduhan di

food, pengunjung dapat menikmati aneka olahan seperti ikan laut bakar dan goreng, cumi bakar dan goreng, kerang, udang, kepiting, hingga cumi masak hitam. Pilihan ikan pun beragam, mulai dari kakap merah, kerapu, baronang, hingga bandeng yang dapat diolah dengan cara bakar, goreng, maupun pallumara.

Tak hanya seafood, Maryam Kitchen juga menyediakan menu utama lainnya seperti paket ayam bakar dan goreng, mie goreng dan mie kering khas Maryam, nasi goreng merah, serta

aneka tumisan seperti kangkung, tauge, dan capcay. Berbagai menu pelengkap seperti perkedel jagung dan nasi bakul turut melengkapi sajian yang ditawarkan.

Untuk menambah cita rasa, tersedia beragam pilihan sambal khas, antara lain sambal ulek, sambal matah, sambal dabu-dabu, sambal rica, hingga racik mangga. Sementara itu, pilihan minuman pun cukup beragam, mulai dari air mineral, es teh, aneka jus, es cincau, kopi, thai tea, hingga es teler khas Maryam.

Owner Maryam Kit-

chen, H. Andi Maria Razak, SE, menyampaikan rasa syukur atas dibukanya secara resmi usaha kuliner tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga serta masyarakat Soppeng atas doa dan dukungan yang diberikan.

"Semoga Maryam Kitchen ini menjadi ladang rezeki halal yang penuh keberkahan dan dapat menjadi tempat berkumpul serta merayakan berbagai momen bersama teman, sahabat, dan orang-orang terkasih," ujarnya.

Acara pembukaan

Pemkab Pinrang Sokong Program Sekolah Rakyat



PINRANG, BN - Pemerintah Kabupaten Pinrang kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah berperan aktif dalam mendukung tercapainya swasembada pangan nasional, kali ini Kabupaten Pinrang menunjukkan keseriusannya dalam menyokong Program Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas nasional yang berfokus pada peningkatan

kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

Komitmen ini disampaikan langsung oleh Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos saat melakukan koordinasi di Kementerian Sosial Republik Indonesia, Selasa (3/2/2026), guna menyampaikan usulan lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pinrang.

Dalam penyampaiannya, Bupati Irwan mengungkapkan bahwa dukungan terhadap Program Sekolah Rakyat sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama.

Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat nantinya diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga dapat menciptakan kesempatan yang lebih adil dalam memperoleh pendidikan yang layak.

"Melalui Sekolah Rakyat, kita berharap lahir generasi muda yang intelekt, adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap menjunjung tinggi etika dan akhlak yang baik. Ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan masyarakat Pinrang," ungkap Bupati Irwan.

Lebih lanjut, dirinya berharap program ini dapat segera terealisasi agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Pinrang, lanjut Bupati Irwan, siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar Program Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. (*sabir)

BPK RI Sulsel Audit LKPD Kab Pinrang Tahun Anggaran 2025



PINRANG, BN - Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025 resmi dimulai oleh tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Bupati Pinrang H. A. Irwan Hamid, S.Sos saat mengunjungi tim audit yang tengah melaksanakan tugasnya di

Kabupaten Pinrang, Kamis (5/2/2026) mengungkapkan harapannya agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala berarti.

Menurut Bupati Irwan, pemeriksaan LKPD bukan sekadar kewajiban administratif, namun merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, Bupati Irwan menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar bersikap kooperatif, membantu tim audit, serta memenuhi setiap permintaan data dan dokumen yang dibutuhkan.

Hal ini dinilai penting agar proses audit berjalan efektif dan hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan. "Pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak langsung pada kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Jika anggaran dikelola secara tertib dan tepat sasaran, maka manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat," ungkap Bupati Irwan.

Sementara itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang A. Haswidy Rustam, SSTP, M.Si mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk tim pendamping guna memudahkan kerja tim audit BPK selama proses pemeriksaan berlangsung.

Dirinya juga berharap seluruh perangkat daerah dapat bersinergi dan responsif dalam memenuhi setiap permintaan tim audit, sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Melalui proses audit ini, Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Pinrang. (*sabin)

Mantan Bupati Soppeng Buka Resmi Maryam Kitchen, Tawarkan Sensasi Kuliner Seafood

KABUPATEN SOPPENG

Kembaran menambah deretan destinasi kuliner dengan hadirnya Maryam Kitchen Soppeng by Maryam Palace Hotel Soppeng yang resmi dibuka pada Jumat, 7 Februari. Kehadiran tempat makan ini menawarkan pengalaman kuliner baru bagi masyarakat dengan konsep menu andalan seafood serta hidangan khas yang menggugah selera.

Maryam Kitchen menghadirkan pilihan menu yang lengkap dan variatif untuk berbagai selera. Pada kategori sea-

food, pengunjung dapat menikmati aneka olahan seperti ikan laut bakar dan goreng, cumi bakar dan goreng, kerang, udang, kepiting, hingga cumi masak hitam. Pilihan ikan pun beragam, mulai dari kakap merah, kerapu, baronang, hingga bandeng yang dapat diolah dengan cara bakar, goreng, maupun pallumara.

Tak hanya seafood, Maryam Kitchen juga menyediakan menu utama lainnya seperti paket ayam bakar dan goreng, mie goreng dan mie kering khas Maryam, nasi goreng merah, serta

aneka tumisan seperti kangkung, tauge, dan capcay. Berbagai menu pelengkap seperti perkedel jagung dan nasi bakul turut melengkapi sajian yang ditawarkan.

Untuk menambah cita rasa, tersedia beragam pilihan sambal khas, antara lain sambal ulek, sambal matah, sambal dabu-dabu, sambal rica, hingga racik mangga. Sementara itu, pilihan minuman pun cukup beragam, mulai dari air mineral, es teh, aneka jus, es cincau, kopi, thai tea, hingga es teler khas Maryam.

Owner Maryam Kit-

chen, H. Andi Maria Razak, SE, menyampaikan rasa syukur atas dibukanya secara resmi usaha kuliner tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga serta masyarakat Soppeng atas doa dan dukungan yang diberikan.

"Semoga Maryam Kitchen ini menjadi ladang rezeki halal yang penuh keberkahan dan dapat menjadi tempat berkumpul serta merayakan berbagai momen bersama teman, sahabat, dan orang-orang terkasih," ujarnya.

Dengan suasana yang nyaman, menu yang beragam, dan cita rasa khas, Maryam Kitchen turut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh mantan Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE, bersama Ketua DPRD Soppeng H. A. Muhammad Farid, S.Sos, serta keluarga besar H. A. Maria Razak, SE, yang memberikan dukungan dan doa atas hadirnya destinasi kuliner baru tersebut.



Dengan suasana yang nyaman, menu yang beragam, dan cita rasa khas, Maryam Kitchen turut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh mantan Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE, bersama Ketua DPRD Soppeng H. A. Muhammad Farid, S.Sos, serta keluarga besar H. A. Maria Razak, SE, yang memberikan dukungan dan doa atas hadirnya destinasi kuliner baru tersebut.

Dengan suasana yang nyaman, menu yang beragam, dan cita rasa khas, Maryam Kitchen turut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh mantan Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE, bersama Ketua DPRD Soppeng H. A. Muhammad Farid, S.Sos, serta keluarga besar H. A. Maria Razak, SE, yang memberikan dukungan dan doa atas hadirnya destinasi kuliner baru tersebut.

Dengan suasana yang nyaman, menu yang beragam, dan cita rasa khas, Maryam Kitchen turut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh mantan Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE, bersama Ketua DPRD Soppeng H. A. Muhammad Farid, S.Sos, serta keluarga besar H. A. Maria Razak, SE, yang memberikan dukungan dan doa atas hadirnya destinasi kuliner baru tersebut.

Dengan suasana yang nyaman, menu yang beragam, dan cita rasa khas, Maryam Kitchen turut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh mantan Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE, bersama Ketua DPRD Soppeng H. A. Muhammad Farid, S.Sos, serta keluarga besar H. A. Maria Razak, SE, yang memberikan dukungan dan doa atas hadirnya destinasi kuliner baru tersebut.

Dengan suasana yang nyaman, menu yang beragam, dan cita rasa khas, Maryam Kitchen turut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh mantan Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE, bersama Ketua DPRD Soppeng H. A. Muhammad Farid, S.Sos, serta keluarga besar H. A. Maria Razak, SE, yang memberikan dukungan dan doa atas hadirnya destinasi kuliner baru tersebut.

Dengan suasana yang nyaman, menu yang beragam, dan cita rasa khas, Maryam Kitchen turut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh mantan Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE, bersama Ketua DPRD Soppeng H. A. Muhammad Farid, S.Sos, serta keluarga besar H. A. Maria Razak, SE, yang memberikan dukungan dan doa atas hadirnya destinasi kuliner baru tersebut.

Dengan suasana yang nyaman, menu yang beragam, dan cita rasa khas, Maryam Kitchen turut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh mantan Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE, bersama Ketua DPRD Soppeng H. A. Muhammad Farid, S.Sos, serta keluarga besar H. A. Maria Razak, SE, yang memberikan dukungan dan doa atas hadirnya destinasi kuliner baru tersebut.

Dengan suasana yang nyaman, menu yang beragam, dan cita rasa khas, Maryam Kitchen turut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh mantan Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE, bersama Ketua DPRD Soppeng H. A. Muhammad Farid, S.Sos,

Soal Wacana Provinsi BMR, Ini Penjelasan Gubernur Sulut YSK Kepada Panitia DOB Bolmong Raya



Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK).

MANADO, BN - Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) menerima panitia pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR), di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Minggu (8/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur YSK berdialog langsung dengan sejumlah tokoh panitia pembentukan Provinsi BMR, di antaranya mantan Wakil Wali Kota Kotamobagu Jainudin Damopolii, mantan Anggota DPRD Denny Mokodompit, Hairil Paputungan, hingga aktivis BMR Didi Musa.

Pada kesempatan itu, YSK menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menjanjikan pemekaran BMR Provinsi saat kampanye masa kampanye Pemilihan Gubernur. "Saya tidak pernah berjanji akan ada pemekaran BMR waktu kampanye Pilgub. Karena saya melihat kondisi BMR saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat dan provinsi," tegas YSK.

Menurutnya, salah satu persoalan utama di wilayah Bolaang Mongondow adalah potensi sumber daya alam yang belum memberikan dampak signifikan bagi pendapatan daerah. "Saya melihat di Bolmong ada potensi besar, terutama tambang emas. Tapi selama ini tidak pernah benar-benar

menjadi pendapatan daerah, hanya dinikmati orang-orang tertentu saja. Ini yang sekarang sedang saya cobakan," ujar YSK.

Gubernur ke-13 Sulut ini menambahkan, saat ini pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah BMR mulai menunjukkan peningkatan. "Pertumbuhan ekonomi dan IPM saat ini sudah meningkat, apalagi kalau sektor pertambangan bisa kita kelola dengan baik dan dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelasnya.

YSK juga menilai bahwa berbagai program pemerintah provinsi saat ini justru banyak terfokus di wilayah Bolaang Mongondow Raya.

"Kalau dilihat, program saya sebagai Gubernur justru lebih banyak di BMR dan itu sedang saya lakukan sekarang," katanya.

Namun demikian, YSK menegaskan bahwa secara objektif BMR saat ini belum sepenuhnya siap untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. "Siapkan kelengkapan berkas yang ada, lalu lapor kepadanya," pungkas Gubernur. (Arman)

ap, tapi sedang dalam tahap persiapan. Mau DOB silakan, tapi harus mengikuti seluruh persyaratan DOB. Jangan sampai itu justru menjadi beban bagi daerah induk," tegaskannya.

Ia mengingatkan agar panitia tidak terburu-buru dan terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan administratif dan indikator ekonomi. "Kita harus lihat PDRB-nya, supaya benar-benar bisa menjadi PAD. Saat ini siapkan dulu, karena memang belum lengkap semua persyaratannya," ujar YSK.

Selain itu, pemerataan Indeks Pembangunan Manusia juga menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Sulut. "IPM harus merata di setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, dan itu yang sedang saya perjuangkan di Bolmong," tandasnya.

Di akhir pertemuan, YSK meminta panitia pembentukan BMR Provinsi untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. "Siapkan kelengkapan berkas yang ada, lalu lapor kepadanya," pungkas Gubernur. (Arman)

Kejari Kotamobagu Gelar Sertijab, Ikram, SH, Kini Jabat Kepala Seksi Pidana Khusus



Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kotamobagu. (ist)

KOTAMOBAGU, BN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu menggelar Upacara Pengambilan Sumpah, Pelantikan, dan Serah Terima Jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Kejari Kotamobagu, Senin (9/2/2026).

Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Saptono, SH, dan dihadiri oleh seluruh pejabat struktural serta jajaran pegawai Kejari Kotamobagu. Dalam prosesi tersebut, Ikram, SH resmi dilantik sebagai Kasi Pidsus, menggantikan Chairul Mokoginta, SH.

Rangkaian acara diawali dengan pembacaan sumpah jabatan, dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan, serta penyematian tanda jabatan oleh Kepala Kejari Kotamobagu sebagai simbol resmi peralihan tugas dan tanggung jawab.

Dalam sambutannya, Saptono, SH menegaskan bahwa pergantian jabatan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bentuk kepercayaan pimpinan sekaligus amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan dedikasi.

"Pelantikan ini bukan hanya pergantian posisi, tetapi merupakan kepercayaan pimpinan dan

tindak pidana khusus yang memiliki tingkat kompleksitas dan sensitivitas tinggi. Menurutnya, setiap aparat penegak hukum dituntut bekerja secara terukur, objektif, adil, serta bebas dari segala bentuk intervensi.

"Identitas kita sebagai aparat penegak hukum adalah bekerja secara profesional, objektif, dan berkeadilan. Bangun tim yang solid, efektif, dan bertanggung jawab, karena keberhasilan penegakan hukum merupakan hasil kerja bersama," lanjutnya.

Mengakhiri sambutan, Saptono menyampaikan doa dan harapan agar seluruh jajaran Kejaksaan senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan petunjuk dalam menjalankan tugas negara. "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan kemampuan kepada kita semua dalam mengembangkan amanah yang telah dipercayakan," pungkasnya. (Arman)

Pemkab Asahan Terima Penghargaan UHC 2026 Kategori Madya



ASAHLAN, BN - Pemerintah Kabupaten Asahan menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 Kategori Madya pada ajang Deklarasi dan Penanaman Universal Health Coverage (UHC) serta Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Penghargaan ini merupakan bagian dari UHC Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kegiatan nasional tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Dr. (HC) Drs. Abdul Muhamimin Iskandar, M.Si., Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, S.Si., CHFC., CLU., serta Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Ghulfron Mukti, M.Sc., Ph.D. Selain itu, acara ini juga dihadiri para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari konsolidasi nasional percepatan UHC.

Mengacu pada siaran pers BPJS Kesehatan, pada UHC Awards 2026 penghargaan diberikan kepada 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten/kota. Hingga 31 Desember 2025, kepesertaan Program JKN secara nasional telah mencapai lebih dari 98 persen

penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Capaian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan UHC sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan dukungan pemerintah daerah.

Bagi Kabupaten Asahan, penghargaan Kategori Madya mencerminkan kerja sistemik lintas perangkat daerah, mulai dari pemutakhiran data kependudukan, dukungan kebijakan dan pembiayaan daerah, hingga penguatan akses layanan kesehatan. Pendekatan ini memastikan bahwa jaminan kesehatan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat ketika membutuhkan layanan kesehatan.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. "UHC bukan sekadar capaian angka kepesertaan. Fokus kami adalah memastikan masyarakat Asahan memperoleh akses layanan kesehatan yang berkelanjutan dan berkualitas. Penghargaan ini menjadi penguat bagi kami untuk terus membenahi sistem, menjaga kesinambungan pembiayaan, dan meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat," ujar Bupati Asahan. (T.P)

Pengurus PC IBI Kabupaten Asahan Periode 2023-2028 Resmi Dilantik



Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos saat melakukan koordinasi di Kementerian Sosial Republik Indonesia. (ist)

Pengurus Daerah IBI Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Muscab IBI Kabupaten Asahan Nomor 006/SKEP/PC IBI/AS/SK/2026 tentang Ketua dan Pengurus Harian Terpilih.

Mewakili Bupati Asahan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Asahan, Mohammad Azmy Ismail, A.P., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan Pengurus PC IBI Kabupaten Asahan Masa Bakti 2023-2028 memiliki arti penting dan strategis dalam memperkuat peran Ikatan Bidan Indonesia sebagai organisasi profesi dan mitra pemerintah daerah di bidang kesehatan, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kebidanan serta penguatan kesehatan ibu dan anak.

Lebih lanjut disampaikan bahwa tantangan pembangunan kesehatan yang semakin kompleks menuntut bidan untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas layanan. Oleh karena itu, para bidan diharapkan berperan aktif mendukung kegiatan Posyandu di desa dan kelurahan, berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan balita, serta menyusun dan melaksanakan program kerja yang sederhana, realistik, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan visi Kabupaten Asahan yang Religius, Maju, dan Berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua PC IBI Kabupaten Asahan Masa Bakti 2023-2028, Sabarhati Taringan, S.Keb., menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan dan mengharapkan dukungan seluruh anggota dalam menjalankan roda organisasi. Ketua Pengurus Daerah IBI Provinsi Sumatera Utara juga meneckan pentingnya tanggungjawab, komitmen, dan sinergi berkelanjutan antara IBI dan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (T.P)

Program Makan Bergizi Gratis Hari Kedua Berjalan di UPTD SMP Negeri 2 Silau Laut



ASAHLAN, BN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di UPTD SMP Negeri 2 Silau Laut memasuki hari kedua pelaksanaan, Selasa (03/02/2026). Pada hari ini, seluruh siswa menerima paket makanan bergizi yang disiapkan sesuai standar penuhan gizi anak usia sekolah sebagai bagian dari upaya peningkatan kesehatan dan kualitas belajar peserta didik.

Pelaksanaan MBG di sekolah tersebut meliputi proses penyiapan, pendistribusian, hingga konsumsi makanan oleh siswa di lingkungan sekolah. Penyediaan makanan dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan didistribusikan kepada siswa dengan pendampingan pihak sekolah serta tenaga kesehatan dari UPTD Puskesmas Silau Laut.

Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P. yang meninjau langsung pelaksanaan program tersebut menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di UPTD SMP Negeri 2 Silau Laut berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari siswa. Program ini diharapkan dapat mendukung penuhan gizi serta meningkatkan konsentrasi belajar anak di sekolah. (T.P)

Bupati Asahan Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pelaksana



Bupati Asahan saat melantik Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pelaksana. (ist)

ASAHLAN, BN - Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Pelantikan yang berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan ini dipimpin oleh Wakil Bupati Asahan, mewakili Bupati Asahan,

sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-13-5.2 Tahun 2026 tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, serta Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-13-1.5.2 Tahun 2026 tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan secara objektif, transparan, serta memenuhi norma, standar, prosedur, dan criteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Asahan menyampaikan pesan strategis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama agar segera melakukan konsolidasi internal, menjawab tantangan sektor yang diampu secara terukur, serta memperkuat sinergi lintas perangkat daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Asahan. Wakil Bupati juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang responsif, berintegritas, dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun pejabat yang dilantik antara lain Ahmad Nizar Simatupang, S.T., M.T. sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan, Musa Al Bakri, S.E., M.Si. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Budi Limbong, S.Sos. sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan, serta Darwinsky Lubis, S.STP sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan.

Selain Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut, pada kesempatan yang sama juga dilantik Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Lurah, dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Acara pelantikan dirangkai dengan tausiah agama dan dihadiri para Asisten, Staf Ahli, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, OPD, Camat, serta tamu undangan lainnya. (T.P)

Puluhan Miliar ...

b. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal sebesar Rp1.129.581.425,02

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen penganggaran dan realisasi Belanja Modal menunjukkan terdapat kesalahan penganggaran Belanja Modal TA 2023 yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah pada empat OPD sebesar Rp1.129.581.425,02.

c. Kesalahan Penganggaran Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp88.574.657,00

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kediri menyajikan anggaran Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp113.397.920.657,44 dengan realisasi sebesar Rp107.455.793.178,41 di antaranya sebesar Rp31.296.031.089,00 merupakan Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan. Hasil analisis data dan dokumen diketahui bahwa terdapat kesalahan penganggaran Belanja Pegawai BLUD pada lima Puskesmas di Kabupaten Kediri yang diberikan kepada Non ASN sebesar Rp88.574.657,00, dimana seharusnya belanja tersebut dianggarkan sebagai Belanja Barang dan Jasa BLUD.

d. Kesalahan Penganggaran Belanja Jasa Pelayanan BLUD Sebesar Rp63.534.474.429,00

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kediri menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.216.315.364.524,00 dengan realisasi sebesar Rp.210.354.258.304,60 di antaranya sebesar Rp.90.746.680.635,04 merupakan Belanja Jasa Pelayanan

Kesehatan.

Hasil analisis data dan dokumen diketahui bahwa terdapat kesalahan penganggaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Kabupaten Kediri dan RSUD Simpang Lima Gumul (SLG) di Kabupaten Kediri yang diberikan kepada PNS dan PPPK sebesar Rp.63.534.474.429,00. Dimana seharusnya belanja tersebut dianggarkan sebagai Belanja Pegawai.

Kondisi tersebut mengakibatkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.63.645.030.269,00 (Rp.110.555.840,00 + Rp.63.534.474.429,00), Belanja Modal sebesar Rp.1.129.581.425,02, Belanja Pegawai sebesar Rp.88.574.657,00 pada Pemerintah Kabupaten Kediri tidak menggambarkan substansi belanja yang sebenarnya. Tulis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan nomor 63.B/LHP/XII/LSBY/04/2024.

Hingga berita ini ditunkan Pemerintah Kabupaten Kediri belum memberikan keterangan resmi perihal Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur tersebut.

Untuk mengetahui dokumen penganggaran atas realisasi Belanja Barang dan Jasa pada enam OPD, serta penyebab kesalahan penganggaran Belanja Modal pada empat OPD hingga kekeliruan penganggaran Belanja Pelayanan BLUD. Ikuti terus Liputan Khusus Redaksi BN edisi selanjutnya. (Toddy Pras H)

Sambungan hal 1

tersebut, BPK menyajikan temuan hasil pemeriksaan secara detail dan menyeluruh mulai dari penerima dana hibah yang telah ditentukan sebelum proses penyusunan anggaran, tim evaluator dibentuk pada tahun pelaksanaan, proposal tidak didukung peta lokasi rencana pelaksanaan pekerjaan, tidak terdapat gambar rencana pekerjaan, foto kondisi 0% lokasi kerja tidak lengkap, analisa harga satuan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan, pekerjaan tidak dilaksanakan, hingga Laporan Pertanggungjawaban bermasalah.

Kelemahan Pengendalian Belanja Hibah

Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan fisik secara uji petik yang dilakukan Auditor Utama BPK atas realisasi pekerjaan pada Pokmas (kelompok masyarakat) penerima dana hibah ditemukan tidak terdapat pelaksanaan pengawasan dari SKPD, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan perubahan lokasi pekerjaan tidak didukung dengan addendum, prasasti tidak dipasang saat pekerjaan selesai dilaksanakan, foto pelaksanaan tidak lengkap menunjukkan progress pekerjaan, LPJ

tidak dilengkapi gambar terpasang, LPJ tidak dilengkapi backup data quantity final, hasil pekerjaan mengalami kerusakan, terdapat 3 Pokmas tidak melaksanakan pekerjaan, kelebihan bayar dari kekurangan volume pekerjaan.

Kelemahan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi

Sesuai dengan ketentuan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh SKPD adalah meneliti kelengkapan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Berdasarkan hasil pemeriksaan data monitoring dan evaluasi diketahui bahwa sampai dengan tanggal 12 April 2023 terdapat 2.066 penerima Hibah pada DPUBM belum menyampaikan LPJ pelaksanaan belanja hibah.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan bayar atas pekerjaan tidak dilaksanakan sebesar Rp549.469.000,00; dan dana hibah yang tidak dilengkapi dengan LPJ sebesar Rp309.465.298.700,00 tidak dapat diyakini penggunaannya.

Kondisi tersebut disebabkan Kepala DPUBM selaku pengguna anggaran tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan

anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya, Evaluator tidak memedomani ketentuan saat melakukan evaluasi proposal calon penerima hibah, penerima hibah tidak melaksanakan pekerjaan, kelebihan bayar dari kekurangan volume pekerjaan.

Belum diketahui secara pasti apakah rekomendasi pengembalian kerugian keuangan daerah atas pekerjaan tidak dilaksanakan sebesar Rp549.469.000,00 dan penggunaan dana hibah yang tidak dilengkapi dengan LPJ sebesar Rp309.465.298.700,00 telah ditindak lanjuti atau belum?

Pelanggaran kepatuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan atas penyelenggaraan belanja hibah pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Provinsi Jawa Timur kembali terjadi, dan terulang kembali.

Temuan penyalagunaan dana hibah tersebut diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 41.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 BAB 1 Huruf C Nomor 12.

Bahwa untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui tindaklanjut atas rekomendasi BPK, Redaksi Surat Kabar BIDIK NASIONAL pada 1 Desember 2025 secara resmi telah mengajukan konfirmasi dengan surat nomor 078/208/KONF.LP/XII/RED.BN yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUBM Provinsi Jawa Timur dan diterima Eka, front office pada Bagian Pengelola Informasi dan Dokumentasi, namun hingga, Jum'at 6 Februari 2026 belum mendapat jawaban.

Bersambung. (Toddy Pras H)

Sambungan hal 1

nilai ketidaksesuaian spesifikasi teknis seluruhnya sebesar Rp. 30.182.023,73,

Temuan pemeriksaan menekankan pentingnya peningkatan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berhenti pada rencana aksi serta tindak lanjut rekomendasi. Untuk memastikan permasalahan yang sama tidak terulang.

Belum di ketahui secara pasti apakah rencana aksi dan tindak lanjut rekomendasi pengembalian kerugian keuangan daerah yang ditimbulkan akibat kekurangan volume serta ketidak sesuaian spesifikasi teknis tersebut telah dilaksanakan atau belum oleh RSUD dr. Soetomo Jawa Timur?

Ikti liputan khusus redaksi BIDIK NASIONAL edisi selanjutnya (Toddy Pras H)

Sambungan hal 1

a. meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas masalah yang terjadi dalam instansi yang menjadi tanggung jawabnya; dan

b. berkoordinasi dengan TPKD untuk memproses penetapan kelebihan bayar sebesar Rp 61.931.400,00. Pemasaran tersebut disebabkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam memantau dan menindaklanjuti masalah yang terjadi dalam instansi yang di pimpinnya.

Menanggapi temuan pemeriksaan tersebut, Tri Krisni Astuti, S.Sos, MM. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menyampaikan konfirmasi bahwa wasanya Instansi yang di pimpinnya melalui BPK (Bidang Pembinaan Kepegawaian) dan Sub Bagian Keuangan sudah melakukan upaya pertejuian dengan pihak keluarga pegawai gaji MY, eks.

Belum di ketahui secara pasti apakah rekomendasi pengembalian keuangan daerah atas pemberian gaji MY, eks.

Gubernur Khofifah ...

Sambungan hal 1

dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim tahun 2019. Khofifah datang ke PN Tipikor sekitar pukul 13.00 WIB. Kedatangan Khofifah disambut selamat oleh ratusan orang simpatisan yang tergabung dalam Barisan Gus dan Santri dan juga Muslimat.

Saat turun dari mobil, orang nomor satu di Jawa Timur ini langsung menuju ruang Cakra PN Tipikor dengan disambut Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Adi Sarono. Tak lupa, Khofifah juga menyapa awak media yang sudah menunggu keduangannya. Setelah majelis hakim yang diketuai Ferdinand membuka sidang, Jaksa Penuntut Umum KPK diminta untuk memanggil saksi.

Jaksa kemudian memanggil Khofifah Indar Parawansa untuk masuk ke ruang sidang. Dengan santun dan memberikan hormat pada Jaksa dan juga majelis hakim, Khofifah duduk di kursi Persidangan dan dilakukan sumpah sebagai saksi.

Perlu diketahui, Khofifah dipanggil sebagai saksi tambahan atas permintaan Ketua Majelis Hakim Ferdinand Marcus L, SH., MH.

Permintaan keterangan dimaksud sediannya diagendakan pada tanggal 05 Februari 2026, namun Gubernur Jawa Timur berhalangan hadir karena adanya agenda tugas yang telah terjadwal, yakni menjadi Keynote Speaker pada kegiatan Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan MPR RI di Surabaya, menghadiri agenda Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jatim dan melakukan kegiatan persiapan kunjungan Presiden RI pada Peringatan Hari Lahir 1 Abad Nahdlatul Ulama yang akan diselenggarakan di Kota Malang Jawa Timur.

Setelah sempat berhalangan hadir pada minggu sebelumnya, Gubernur Jawa Timur dijadwalkan hadir pada pemeriksaan berikutnya tanggal 12 Februari 2026. Adapun pemberian keterangan oleh Gubernur dalam persidangan tersebut diharapkan dapat mengklarifikasi tuduhan Alm. Kusnadi seperti dalam BAP yang pernah dibacakan dalam persidangan sebelumnya. "Mohon maaf pada panggilan hari Kamis (5/2) lalu kami belum bisa memenuhi panggilan itu pada semua jajaran Yang Mulia dan JPU," kata Khofifah saat persidangan, Kamis (12/2).

Khofifah mengatakan, pada panggilan sidang sebelumnya ia harus menghadiri sejumlah agenda. Salah satunya yakni Sidang Paripurna di DPRD Jatim. "Kami saat itu harus menghadiri sidang paripurna yang kami tidak bisa mewakilkan karena Pak Wagub sedang ada rapat strategis di Jakarta dan Pak Sekda ada perjalanan ke luar negeri," ucapnya. (sumber: detik.com/cnn.indonesia.com/red)

Gubernur Jawa Timur ...

Sambungan hal 2

Menurutnya, pendekatan praktik langsung membuat siswa terbiasa menghadapi kebutuhan riil di dunia kerja. Mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga pengalaman layanan langsung. Khofifah mencontohkan siswa jurusan tata boga yang mengelola resto dan kafe untuk umum. Selain itu, ada juga praktik perhotelan, tata busana, kecantikan, hingga tata rambut.

"Ini bukan sekadar magang, tapi mereka benar-benar melayani publik. Rasa percaya diri mereka tumbuh karena terbiasa berhadapan langsung dengan pelanggan," jelasnya. Model pembelajaran tersebut juga memperkuat koneksi antara sekolah dan dunia usaha serta dunia industri (DUDI). Kolaborasi itu dinilai menjadi kebutuhan utama pendidikan vokasi.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menyebut serapan lulusan SMK sangat dipengaruhi kemampuan sekolah mengikuti perkembangan zaman. Termasuk di dalamnya pemanfaatan teknologi digital.

Menurut Aries, kemajuan teknologi justru harus menjadi pendorong peningkatan kompetensi siswa. Sejumlah sektor seperti perhotelan, pariwisata, kuliner, dan tata busana disebut tidak pernah kehilangan pasar. Ia menambahkan, pemasaran digital membuat jangkauan produk siswa menjadi lebih luas. Produk tidak lagi terbatas dijual secara offline. Contohnya, produk tata boga seperti roti dan makanan olahan sudah dipasarkan secara online. Karya tata busana siswa juga mulai dijual melalui berbagai platform digital.

Dengan pendekatan tersebut, siswa tidak hanya disiapkan masuk industri, tetapi juga menjadi wirasusa. Sekolah mendorong lulusan mampu membuka lapangan kerja sendiri. Kepala SMKN 1 Buduran, Agustina, mengungkapkan tingkat serapan lulusan di sekolahnya mencapai sekitar 97,5 persen. Sebagian besar lulusan langsung bekerja. Sisanya memilih berwirausaha atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bahkan, sejumlah siswa kelas 11 sudah menjalankan usaha jasa secara mandiri.

"Beberapa industri sudah datang dan merekrut lebih awal. Jadi sebelum lulus pun, sudah ada siswa yang diambil. Kami ingin memastikan setiap lulusan punya masa depan yang jelas," pungkasnya. (Teddy Syah)

Korban dan Pelaku ...

Sambungan hal 2

menderita luka berat atas nama Ita Purnama Sari (31 tahun) korban, masih dalam penanganan medis di RS Islam dan keadaannya sekarang sudah membaik, terang Kanit Gakkum Dendi.

Menurut keterangan kanit, pelaku Sutoyo Dusun Darungan RT/RW 10/5 Desa Klampokarum Kec. Tekung berbatasan dengan Desa Dorogowok Kec. Kunir sebagai korban ternyata masih bersaudara dan beberapa rumah saja dari rumah Sutoyo, terang Kanit Gakkum Dandy. Kejadian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan, untuk yang meninggal dibantu mulai dari awal tahlilan sampai 1000 harinya dan biaya untuk pemakamannya juga dibantu, untuk korban yang luka-luka dibantu biaya untuk ke rumah sakit sampai sembuh, jadi kami masih menunggu apa ini diselesaikan secara kekeluargaan apa lanjut.

Kalau memang nanti terjadi mediasi kekeluargaan di kantor kami, kata Dendi, kami akan membantu berdasarkan pada aturan Restorative Justice Perpol No. 8 Tahun 2021 (Pasal 1 angka 3), Perja No. 15 Tahun 2020, Perma No. 1 Tahun 2024 (Pasal 6 ayat 1), serta KUHP Baru No. 1 Tahun 2023 (Pasal 54 dan 99).

Untuk unit kendaraan xpander tersebut, kami amankan di tempat lain, supaya tidak tambah rusak dan biar juga tambah aman. Pesan Kanit Gakkum Ipda Dendi untuk masyarakat Lumajang, karena bulan Januari-Februari deras-derasnya hujan, harap berhati-hati bila berkendaraan dan memakai helm pengaman juga perlengkap surat-surat supaya dibawa, agar selamat sampai ditujuan. (SON)

Tanggul Sungai ...

Sambungan hal 5

hasil panen yang belum sempat diangkat malah terbawa air," ujar Turiman.

Salah seorang warga Dusun Kertajaya, Abah Ajid , mengaku sangat terpukul atas kejadian tersebut. Ia menyebut kerugian yang dialami petani cukup besar karena terjadi tepat menjelang masa panen.

"Kami para petani benar-benar kaget. Padi sudah mau dipanen, bahkan ada yang sudah dipotong tapi belum diangkat, tiba-tiba air datang besar. Hasil panen rusak, ada juga yang hanyut," tutur Abah Ajid dengan nada prihatin.

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy melalui Satuan Kerja SDA OP 3 langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat. Alat berat berupa ekskavator didatangkan guna mempercepat perbaikan tanggul yang Jebol.

Penanganan darurat telah terealisasi, dan saat ini proses perbaikan tinggal menunggu material untuk penguatan tanggul. Di lokasi terlihat PPK OP 3 Ijang , Satker Andi, bersama tim pengawas serta pengusaha lokal yang bergerak cepat menanggulangi kerusakan tanggul Sungai Citalahap.

Turiman menjelaskan bahwa rencana perbaikan tanggul sebenarnya sudah direncanakan sejak jauh hari, namun belum sempat dilaksanakan hingga akhirnya tanggul lebih dulu Jebol akibat meningkatnya debit air sungai.

Selain perbaikan darurat, Pemerintah Desa Sukahurip meminta kepada BBWS Citanduy agar ke depan dilakukan normalisasi Sungai Citalahap sepanjang kurang lebih 2.000 meter sebagai langkah pencegahan jangka panjang. "Kami berharap ada normalisasi sungai sekitar dua kilometer, supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan lahan pertanian warga bisa lebih aman," tegas Turiman.

Warga Dusun Kertajaya berharap pemerintah pusat melalui BBWS Citanduy tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga memberikan solusi permanen agar bencana banjir dan tanggul Jebol tidak terulang setiap musim hujan. (Asep Sujana)

oknum guru terpidana kasus asusila tersebut telah dilaksanakan Dinas Pendidikan? dan Benarkah pengem-

bilan kerugian keuangan daerah dapat di angsur, sebagaimana keterangan Dinas Pendidikan. Lantas khusus BIDIK NASIONAL. Bersambung (Toddy Pras H)



Gerak Cepat, DPRD Kab Pasuruan Bentuk Pansus SOTK



PASURUAN, BN - DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan se-

cara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatip) sebagai tindak lanjut dari

perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pasuruan.

Gerak cepat DPRD Kabupaten Pasuruan menyelaraskan aturan internal dilakukan menyalurkan adanya penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah. Ketua DPRD, Samsul Hidayat menjelaskan Pansus Tatip dibentuk untuk menyesuaikan peraturan internal dewan, mengingat perubahan SOTK otomatis mengubah peta kemitraan dengan Organisasi Perangkat Daerah di komisi lembaga ini.

"Penyesuaian kewenangan komisi meliputi

restrukturisasi mitra kerja dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran terhadap jalannya pemerintahan daerah melalui OPD. Jadi fungsi komisi yang diatur ulang," kata politisi senior partai besutan Muhammadi Idskandar, tersebut.

Samsul Hidayat optimis Panitia Khusus Tata Tertip SOTK dengan cepat menyelesaikan proses pembahasan sehingga dapat segera disahkan, mengingat SOTK sudah diterapkan, maka kami harus cepat menyesuaikannya, agar tidak

mengganggu layanan kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan.

"Kami tekankan Pansus selesai dalam sepekan agar optimalkan kinerja anggota dewan dengan mitra kerja yang baru segera berjalan maksimal, meningkatkan perubahan ta-tib bertujuan meningkatkan kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran terhadap OPD optimal."

Lebih lanjut, Gus Samsul, sapaan akrab Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan mengungkapkan, Pansus dalam

merumuskan Tata Tertip bakal didampingi tenaga ahli kompeten di bidang hukum tata negara. Kehadiran ahli ini krusial untuk memberikan "pen-cerahan" agar tidak terjadi multi-tafsir terkait PP Nomor 12 Tahun 2018, mengenai teknis distribusi keanggotaan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

"Rekan-rekan anggota dewan di Pansus bisa langsung bertanya kepada ahlinya agar pemahaman dan penafsiran hukumnya seragam, terutama soal pasal-pasal krusial di PP 12/2018," tambahnya.(Adv*)

DPRD Kab Pasuruan Bentuk Satgas Penanganan Banjir

PASURUAN, BN - DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menginisiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Banjir di Kecamatan Gempol agar lebih cepat terselesaikan. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat memastikan pembentukan Satgas Penanganan Banjir Gempol akan segera kukuhkan dalam waktu dekat.

Kepastian pembentukan Satgas Penanganan Banjir di Kecamatan Gempol tersebut disampaikan Samsul Hidayat usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Gempol, pada, Kamis (5/2/2026).

Dalam forum tersebut, Gus Samsul, sapaan karib Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan secara tegas meminta Camat Gempol, Hadi Mulyono segera mengonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan untuk membentuk satgas penanganan banjir.

"Setelah acara ini selesai, saya minta Pak Camat langsung mengumpulkan seluruh stakeholder untuk membentuk Satgas Penanganan Banjir Gempol," tegas politisi Senior PKB, tersebut.

Pria yang dikenal karena kedekatnya dengan masyarakat tersebut menyampaikan keperihatinannya terhadap persoalan

banjir di Gempol yang berulang dan seolah tak kunjung tuntas. Padahal, tanahnya, secara politik dan kelembagaan, wilayah tersebut memiliki kekuatan dan akses yang memadai. Dikutip dari TribunJatim.com,

"Terus terang saya merasa risih. Banjir di Gempol ini tidak selesai-selesai. Padahal Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, hingga Ketua DPD partai ada di Gempol," ungkap Samsul Hidayat

Menurut Samsul, satgas yang akan dibentuk tidak boleh bekerja secara sektoral. Penanganan banjir harus dilakukan melalui kolaborasi lintas pihak, melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk turun langsung menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan Gempol. Langkah ini dinilai krusial, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah akibat kebijakan efisiensi.

"Kalau hanya mengandalkan APBD, tentu berat. Anggaran sekarang semuanya kena efisiensi. Karena itu, keterlibatan pihak ketiga, khususnya perusahaan, menjadi sangat penting," terangnya.



Ketua DPRD, Samsul Hidayat, saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Gempol.

Satgas Penanganan Banjir Gempol nantinya direncanakan beranggotakan unsur Muspika, pemerintah desa, perusahaan, serta elemen masyarakat. Satgas ini akan bertugas menyusun pembagian peran, langkah teknis penanganan, hingga strategi jangka menengah dan panjang pengendalian banjir. (Adv*)

HARI PERS NASIONAL

JAWA TIMUR
GERBANG BARU
NUSANTARA

#BerAKHLAK > bangga
#melayani bangsa

H.R. MURAHANTO

Sekretaris DPRD
Kota Pasuruan

H.M. TOYIB

H.M. GATOT ADIDYO

H. ISMAIL M. HASAN, SE

WAKIL KETUA DPRD KOTA PASURUAN

KETUA DPRD KOTA PASURUAN

H. M. GATOT ADIDYO

WAKIL KETUA DPRD KOTA PASURUAN